

SKRIPSI

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR
BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP
PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Oleh :

**SHERLY DWI CIPTA
160412072**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR
BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP
PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**SHERLY DWI CIPTA
160412072**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG
INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN
REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
Kuantan Singingi**

disusun dan diajukan oleh :

**SHERLY DWI CIPTA
160412072**

telah diperiksa dan disetujui
oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 04 Juli 2020

Pembimbing I



Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Pembimbing II



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Yul Emir Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG
INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN
REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**SHERLY DWI CIPTA
160412072**

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal **06 Agustus 2020**
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua	1
2	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Sekretaris	2
3	Zul Ammar, SE., ME	Anggota	3
4	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota	4
5	M. Irwan, SE., MM	Anggota	5
6	Diskhamarzeweny, SE., MM	Anggota	6

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Ketua
Program Studi Akuntansi

Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sherly Dwi Cipta
NPM : 160412072
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 04 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

SHERLY DWI CIPTA
NPM. 160412072

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran dalam membimbing penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran dalam membimbing penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh pegawai dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data mengenai penelitian ini.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda **Saidina Usman** dan Ibunda **Dewi Murni** yang selalu senantiasa memberikan do'a, telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, semoga penulis mampu menjadi seperti yang mereka harapkan.
9. Saudara kandung penulis Kakakku **Rezi Chanberla, SE** yang selalu memberi do'a, semangat, motivasi dan inspirasi tanpa pamrih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai.
10. Saudara sepupu penulis **Pusvita Sari** yang selalu memberi do'a, semangat, motivasi dan selalu setia menemani penulis tanpa pamrih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai.
11. Seluruh keluarga besar kakek **Alm. Abdul Razak** dan keluarga besar kakek **Alm. Saidina Umar** tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
12. Sahabat setiaku **Rika Apriyani, S.Ak, Nur Halimatun Syahdiah, S.Ak Mardaweli, S.Ak, Pipi Pebrianti, S.Ak, Risnawati, S.Ak, Dina Konita Dwiarti S.Ak dan Maryanti S.Ak** yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Akuntansi A angkatan 2016 dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas kebersamaan dan kerjasamanya.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamualaikum wr. wb.

Teluk Kuantan, 04 Juli 2020

Penulis,

SHERLY DWI CIPTA
NPM. 160412072

ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sherly Dwi Cipta
Zul Ammar, SE., ME
Rina Andriani, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi (2) Pengaruh latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi (3) Pengaruh latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi (4) Pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel nonprobabilitas tepatnya pemilihan sampel bertujuan. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Data analisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistik (SPSS 21), setelah diuji asumsi klasik terpenuhi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$; (2) Latar belakang individu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$; (3) Latar belakang politik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$; (4) Pemahaman regulasi anggota DPRD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik, Pemahaman Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah

ABSTRACT

**EFFECT OF SOCIETY PARTICIPATION, INDIVIDUAL BACKGROUND,
POLITICAL BACKGROUND AND COMPREHENSION OF THE REGULATIONS
OF ASSEMBLY AT REGIONAL (DPRD) MEMBERS ON THE ROLE OF
ASSEMBLY AT REGIONAL (DPRD) MEMBERS IN THE SUPERVISION OF
REGIONAL FINANCES**

Sherly Dwi Cipta
Zul Ammar, SE., ME
Rina Andriani, SE., M.Si

The aims of this research are to know (1) The effect of society participation on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency (2) The effect of individual background on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency (3) The effect of political background on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency (4) The effect of comprehension of the regulations of assembly at regional (DPRD) members on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency.

This type of research is causal research using a quantitative approach. The sample in this research used the nonprobability sample selection method, precisely the purposive sampling. The source of data in this research is primary data obtained from the results of questionnaires directly to respondents. Data were analyzed using multiple linear regression with a statistical program (SPSS 21), after the classical assumption test was fulfilled.

The results of the research shows that (1) Society participation partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,013 < 0,05$; (2) Individual background partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,001 < 0,05$; (3) Political background partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,004 < 0,05$; (4) Comprehension of the regulations of assembly at regional (DPRD) members partially has a positive and significant effect on the role of assembly at regional (DPRD) members in the supervision of regional finances in the Kuantan Singingi regency with a significance value of $0,005 < 0,05$.

Keywords : Society Participation, Individual Background, Political Background, Comprehension of the Regulations and Supervision of Regional Finances

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Keuangan Daerah (APBD).....	15
2.1.2. Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	22
2.1.3. Partisipasi Masyarakat	35
2.1.3.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	35
2.1.3.2. Bentuk dan Tipe Partisipasi	38

2.1.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
Partisipasi.....	41
2.1.4. Latar Belakang Individu.....	43
2.1.5. Latar Belakang Politik	45
2.1.6. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD.....	47
2.2. Penelitian Terdahulu	49
2.3. Pengembangan Hipotesis.....	53
2.3.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	53
2.3.2. Pengaruh Latar Belakang Individu Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	54
2.3.3. Pengaruh Latar Belakang Politik Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	56
2.3.4. Pengaruh Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	57
2.4. Model Penelitian.....	58
2.5. Hipotesis.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1. Rancangan Penelitian	61
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	61
3.2.1. Tempat Penelitian	61
3.2.2. Waktu Penelitian	62
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	64
3.3.1. Populasi.....	64
3.3.2. Sampel.....	64
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	68
3.4.1. Jenis Data.....	68
3.4.2. Sumber Data	68
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	69

3.6.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	70
3.6.1.	Variabel Penelitian	70
3.6.1.1.	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	70
1.	Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)	71
3.6.1.2.	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	71
2.	Partisipasi Masyarakat (X1)	72
3.	Latar Belakang Individu (X2)	73
4.	Latar Belakang Politik (X3).....	74
5.	Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)	75
3.6.2.	Definisi Operasional	76
3.7.	Instrumen Penelitian	77
3.8.	Metode Analisis Data	79
3.8.1.	Uji Validitas.....	79
3.8.2.	Uji Reliabilitas	80
3.9.	Uji Asumsi Klasik.....	80
3.9.1.	Uji Normalitas Data	80
3.9.2.	Uji Multikolinieritas.....	81
3.9.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	82
3.9.4.	Uji Autokorelasi.....	82
3.10.	Uji Hipotesis	83
3.10.1.	Uji F	83
3.10.2.	Uji t.....	84
3.10.3.	Koefisien Determinasi (R^2).....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		87
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	87
4.1.1.	Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi.....	87
4.1.2.	Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi.....	91
4.1.3.	Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	94
4.1.4.	Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	98
4.2.	Deskripsi Data	99

4.3.	Deskripsi Responden	100
4.4.	Karakteristik Responden	101
4.5.	Hasil Pengujian dan Analisis Data	104
4.5.1.	Analisis Data dan Statistik Deskriptif Variabel	104
4.5.1.1.	Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y).....	106
4.5.1.2.	Partisipasi Masyarakat (X1)	109
4.5.1.3.	Latar Belakang Individu (X2).....	112
4.5.1.4.	Latar Belakang Politik (X3).....	115
4.5.1.5.	Pemahaman Regulasi Anggota DPRD(X4) .	118
4.5.2.	Hasil Uji Validitas.....	121
4.5.2.1.	Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y).....	122
4.5.2.2.	Partisipasi Masyarakat (X1)	123
4.5.2.3.	Latar Belakang Individu (X2).....	124
4.5.2.4.	Latar Belakang Politik (X3).....	124
4.5.2.5.	Pemahaman Regulasi Anggota DPRD(X3) .	125
4.5.3.	Hasil Uji Reliabilitas	126
4.5.4.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	127
4.5.4.1.	Hasil Uji Normalitas Data	128
4.5.4.2.	Hasil Uji Multikolonieritas	129
4.5.4.3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	130
4.5.4.4.	Hasil Uji Autokorelasi.....	131
4.5.5.	Hasil Uji Hipotesis	132
4.5.5.1.	Analisis Regresi Linear Berganda	132
4.5.5.2.	Hasil Uji F	135
4.5.5.3.	Hasil Uji t.....	137
4.5.5.4.	Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	142
4.6.	Pembahasan Hasil Penelitian	143
4.6.1.	Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	143

4.6.2. Pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	145
4.6.3. Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	146
4.6.4. Pengaruh Pemahaman Regulasi Anggota DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	148
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	150
5.1. Kesimpulan.....	150
5.2. Saran	151
5.3. Keterbatasan	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	158

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Hasil Review Penelitian Terdahulu	49
3.1. Jadwal Penelitian	63
3.2. Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 2019-2024	65
3.3. Definisi Operasional dan Indikator Variabel	76
4.1. Tingkat Pengambilan Kuesioner	99
4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	102
4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	103
4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	103
4.5. <i>Descriptive Statistics</i>	105
4.6. Tanggapan Responden terhadap Variabel Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	106
4.7. Tanggapan Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)	109
4.8. Tanggapan Responden terhadap Variabel Latar Belakang Individu (X2)	112
4.9. Tanggapan Responden terhadap Variabel Latar Belakang Politik (X3)	115
4.10. Tanggapan Responden terhadap Variabel Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)	118
4.11. Hasil Pengujian Validitas Variabel Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	122
4.12. Hasil Pengujian Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat.....	123
4.13. Hasil Pengujian Validitas Variabel Latar Belakang Individu	124
4.14. Hasil Pengujian Validitas Variabel Latar Belakang Politik	125
4.15. Hasil Pengujian Validitas Variabel Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	125

4.16.	Hasil Uji Reliabilitas	127
4.17.	Nilai <i>Tolerance</i> dan <i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	130
4.18.	Hasil Uji Autokorelasi.....	132
4.19.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	133
4.20.	Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F).....	136
4.21.	Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)	138
4.22.	Rangkuman Hasil Hipotesis	141
4.23.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	142

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1.1. Bagan Anggota DPR/DPRD yang Terjerat Kasus Korupsi	5
2.1. Kerangka Pemikiran	59
4.1. Grafik <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	128
4.2. Grafik <i>Scatterplot</i>	131

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
1 Kuesioner	158
2 Tabulasi Data	169
3 Hasil Pengolahan Data	184
4 Tabel r.....	210
5 Tabel F.....	213
6 Tabel t.....	215

BAB I

PENDAHULUAN

7.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Alfines, 2013:3).

Menurut ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai fungsi, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah digunakannya hak-hak DPRD dalam proses mekanisme APBD baik dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban APBD. Hak-hak yang digunakan DPRD antara lain hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif.

Menurut Alamsyah (1997) dalam Aira (2012:1) Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan (1) anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:3).

Indonesia mulai menempuh era baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja,2017:76), Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didukung Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan dampak positif bagi pihak legislatif, yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsinya, yaitu sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

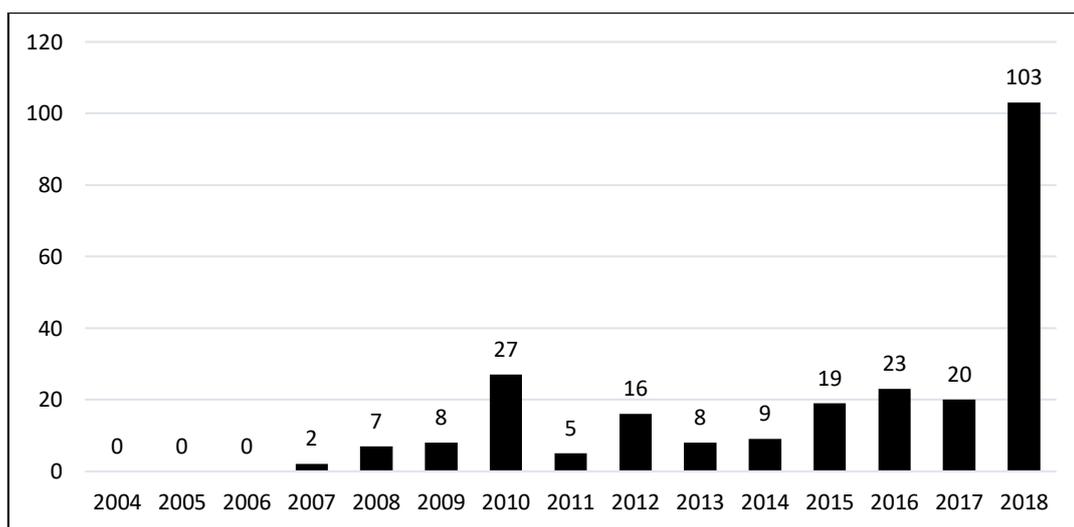
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai sesama unsur pemerintahan daerah, pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) sejajar, yang membedakannya adalah fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya. Dengan demikian, hubungan yang harus dibangun antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mestinya hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Alfines, 2013:4).

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif). Sejak itulah kekuasaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini bertujuan agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan tercipta keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain kedua Undang-Undang diatas, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mendasari pemerintah daerah

untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD) menyebabkan banyak terjadinya penyelewengan, berdasarkan catatan KPK dari 2004-2019, kasus korupsi paling banyak terjadi di tahun 2018 dan anggota DPR serta DPRD yang paling korup. Anggota DPR/DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru melakukan korupsi yang merupakan tindakan tercela dan merugikan negara. Berdasarkan data KPK anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2018 melonjak lima kali lipat menjadi 103 orang dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Bagan 1.1
Anggota DPR/DPRD yang Terjerat Kasus Korupsi
(2004 – 2018)



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2019

Kemudian fenomena yang ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu penyimpangan dana bantuan pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar lebih. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2016 (riaumandiri.com Selasa 27 februari 2018). Kasus ini melibatkan mantan sekretaris daerah dan mantan bendahara daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan temuan tersebut, BPK memberikan tenggat waktu pihak terkait untuk menindaklanjutinya dalam 60 hari setelah terbitnya LHP. Permasalahan ini timbul karena adanya ketidakkonsistenan antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Akibatnya terjadi penyalahgunaan anggaran.

Kasus lain yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu korupsi yang dilakukan anggota dewan sendiri. Korupsi dana pengurusan sertifikat Rp.1,2 Milyar, Mantan DPRD Kuantan Singingi divonis 6 tahun penjara (riauterkini.com, 3 April 2018). Terdakwa telah melakukan penyelewengan dana pengurusan sertifikat lahan perkebunan sawit yang bermitra dengan PT Perkebunan Nusantara V. Dimana perbuatan terdakwa itu terjadi pada tahun 2010. Saat terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Siampo Pelangi Cerenti, Kuantan Singingi, dan juga tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Terdakwa menggunakan dana pengurusan sertifikat itu untuk keperluan pribadi.

Padahal korupsi yang terbesar dan sangat kronis justru terjadi di lembaga eksekutif, nilai korupsi DPRD relatif kecil dibandingkan eksekutif dampaknya akan memiliki bobot yang lebih luas dan jauh lebih berbahaya karena dilakukan oleh institusi yang seharusnya berperan meluruskan ketika ada penyimpangan, ini berarti bahwa selama ini ada panitia anggaran tetapi tidak menangani masalah penyimpangan anggaran.

Ditambah lagi dengan ketidakhadiran dan keterlambatan anggota dewan menghadiri Rapat Paripurna di Kuansing, hal itu membuat rapat menjadi molor 1 jam lebih (halloriau.com, 17 desember 2018). Seharusnya anggota dewan sebagai

anggota legislatif memberikan contoh yang lebih baik kepada para eksekutif. Rapat paripurna ini sangat penting untuk dihadiri oleh anggota DPRD dan juga pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran.

Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Partisipasi Masyarakat, Latar belakang individu, Latar belakang politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD.

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Sari, 2014:6).

Hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dapat terlaksana dengan baik. Karena tujuan dari pengawasan keuangan daerah itu adalah agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik. Dan juga DPRD merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, tentunya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi peran anggota DPRD tersebut dalam hal pengawasan keuangan daerah (APBD).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan, misalnya pada saat pelaksanaan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang merupakan agenda

tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan usulan masyarakat di kategorikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Itu berarti adanya keterlibatan masyarakat dalam rangka penyusunan APBD demi tercapainya akuntabilitas dan transparansi publik serta peran Anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat tersebut diharapkan bisa membantu peran Anggota DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya (2012) menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2012) yang menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Simson, dkk 2007) menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD. Karena perbedaan hasil penelitian terdahulu inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan unit analisis yang berbeda menggunakan variabel independennya partisipasi masyarakat.

Menurut pendekatan *behaviorisme*, individu dianggap secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:35). Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga politik

yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut, dalam hal ini para anggota DPRD.

Latar belakang individu merupakan latar belakang diri yang melekat pada setiap individu. Latar belakang diri dari anggota DPRD yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, dan relevansi latar belakang pekerjaan. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anggota DPRD, baik pendidikan formal maupun informal. Relevansi bidang pendidikan adalah keterkaitan jurusan atau bidang studi yang dimiliki anggota DPRD dengan fungsi pengawasan dan keuangan. Relevansi latar belakang pekerjaan adalah keterkaitan pekerjaan atau profesi terakhir yang digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan dengan fungsi pengawasan. Latar belakang diri berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Oleh karena itu harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Nuraini, 2017:8).

Hubungan antara latar belakang diri anggota DPRD dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah apabila latar belakang yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sesuai dengan pekerjaan yang ia geluti sekarang, maka perannya dalam pengawasan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik. Contohnya saja relevansi bidang pendidikan, artinya kesesuaian bidang pendidikan anggota DPRD dengan perannya dalam pengawasan keuangan daerah. Misalnya di Komisi B DPRD Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Bidang Perekonomian, itu artinya harus menempatkan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan

yang sesuai dengan bidang tersebut agar perannya dalam pengawasan keuangan daerah berjalan dengan sesuai dan terlaksana dengan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa dan Irmadariyani (2016) menunjukkan bahwa *personal background* seseorang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menemukan bahwa *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) dimana *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Karena perbedaan hasil penelitian inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan unit analisis yang berbeda menggunakan variabel independennya Latar belakang individu.

Latar belakang politik merupakan pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Latar belakang politik ini meliputi pengalaman di bidang politik, asal parpol koalisi, jabatan di partai politik dan asal komisi. Pengalaman di bidang politik merupakan pengalaman anggota DPRD berkecimpung di dunia politik. Asal partai politik yang dimaksud disini adalah asal partai politik dari anggota DPRD yang terpilih. Partai koalisi adalah gabungan beberapa partai yang berguna untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik yang dilihat dari keikutsertaannya sebagai pengurus di dalam partai politik. Asal komisi yaitu asal komisi anggota dewan di DPRD (Nuraini, 2017:9).

Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharuskan untuk mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai komisi masing-masing. Perbedaan latar

belakang politik sering menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat bahkan perselisihan antar anggota DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Akan ada pengaruhnya latar belakang politik dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, karena La Palombara 1974 dalam (Amalia, 2013:6) menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif dalam pengawasan keuangan daerah yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik, dan sifat pemilih.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) dan Rosita (2014) menemukan bahwa *political background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menemukan bahwa *Political background* tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Karena adanya perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk memasukkan variabel latar belakang politik ke dalam penelitian.

Selain partisipasi masyarakat, latar belakang individu dan latar belakang politik ada faktor lain yang akan mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur tentang keuangan daerah yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain - lain. Regulasi ini menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami regulasi agar dapat memastikan keuangan daerah sudah berjalan sesuai tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) menemukan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Peneliti tertarik untuk menggunakan variabel Pemahaman Regulasi ke dalam penelitian, karena tidak banyak orang yang peneliti temukan menggunakan variabel ini, selebihnya banyak yang menggunakan variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran. Jadi, peneliti masih ragu apakah variabel pemahaman regulasi benar-benar mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.**

7.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah latar belakang individu berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah latar belakang politik berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

4. Apakah pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

7.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

7.4. Manfaat Penelitian

7.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

7.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, manfaat bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian. Selain itu, dengan penulisan ini diharapkan mampu mengasah daya kritis penulis terhadap kejadian-kejadian dalam pengawasan keuangan daerah serta menambah pengetahuan penulis, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan topik pengaruh partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan/kajian dan dasar perkembangan bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya sebagai pengawas keuangan daerah.
3. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam meningkatkan pengaruh masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah serta pertimbangan bagi pemilih dalam memilih wakil rakyat yang dapat melaksanakan dan mewakili rakyat khususnya dalam pengawasan keuangan.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu berkaitan dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
5. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi serta referensi bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah (APBD)

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Keuangan daerah sepenuhnya disusun kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Halim (2014:11) menjelaskan ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari "Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)". Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.

Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa.

APBD sendiri merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu diatur landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau Perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut:

- a. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- b. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
- c. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, yang kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini bertujuan agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan piutang dan utang, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Dalam hal ini instansi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

2.1.2. Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Pengawasan merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen.

Mardiasmo (2001) dalam (Mutia, 2014:7), mendefinisikan pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan daerah dapat diartikan sebagai pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah disini adalah Pengawasan APBD. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan pada tahap implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan.

Dalam suatu sistem pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terdapat pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu konflik yang terjadi antara lembaga-lembaga yang ada dalam suatu pemerintahan tersebut dan perlu dibentuk suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan mengimbangi antara satu

sama lain. Pembagian kekuasaan dalam sistem Pemerintah Daerah yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/ Kepala daerah sebagai pihak Eksekutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Sehingga dengan fungsi dan kedudukan yang telah dijelaskan tersebut, kedua lembaga tersebut, baik DPRD maupun pemerintah daerah harus dapat menjalankan tugas dengan baik, kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan dan tidak saling menjatuhkan, tetapi harus dapat menciptakan dan memelihara suatu kerjasama yang baik. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, dimana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula sebaliknya parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik selanjutnya disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakatnya guna menjamin suatu kepuasan masyarakat dan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Sebagai unsur lembaga Pemerintah daerah, DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak *budget* (hak untuk

menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD) (Dewi, 2011:33).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga.

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.
2. Fungsi Penganggaran, proses penganggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah.
3. Fungsi Pengawasan, salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah).

Dari penjelasan diatas, fungsi DPRD ada tiga, yang pertama adalah fungsi legislasi. Dalam suatu pemerintahan yang memiliki satu tujuan, visi dan misi yang hendak dicapai, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki suatu hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan ini tercermin dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan daerah, seperti peraturan daerah. Hal ini tercermin dalam pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu otonomi daerah, sehingga dapat terwujud suatu hubungan kerja yang baik dan saling mendukung satu sama lain, bukan untuk mementingkan kepentingan golongan tertentu dan menjadi pesaing untuk menjatuhkan lembaga tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Fungsi Legislasi yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah. Pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan proses perumusan kebijakan publik, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan bersifat formal untuk mengatur jalannya suatu sistem pemerintah daerah yang baik, maka substansi dari peraturan daerah ini memuat semua peraturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan hal-hal yang diatur. Hal ini sesuai dengan latar belakang DPRD, dimana DPRD adalah wakil rakyat yang mampu menampung aspirasi rakyat dan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi rakyat tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga peraturan-peraturan yang disusun tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah dan DPRD mempunyai wewenang dalam pembuatan kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini DPRD memegang peranan yang besar dalam hal pengesahan Peraturan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi DPRD yang kedua adalah fungsi penganggaran. Proses penganggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam proses penganggaran ini, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. DPRD harus bertindak secara aktif, proaktif dan selektif, karena DPRD menjadi legitimator Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang kemudian disebut dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah supaya menjadi APBD yang sah.

Berdasarkan Penjelasan Laksono (2009) dalam Dewi (2011:35) peran parlemen dalam penetapan APBD sangatlah penting. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- a. Perlunya mekanisme "*checks and balances*" dalam hubungan kerja dan kewenangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (Parlemen) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
- b. Aspek keterbukaan atau transparansi, biasanya mekanisme perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lebih tertutup dibandingkan dengan mekanisme yang berlangsung di DPRD. Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa peran DPRD dalam penetapan APBD bertujuan untuk menciptakan suatu transparansi dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan bagi publik, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung membuka peluang bagi pihak luar dan partisipasi masyarakat untuk program kerja dan kebijakan yang akan dirancang dalam APBD.

Fungsi DPRD yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah), apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Dewi, 2011:50).

Pengawasan menurut Undang-Undang pasal 77 Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan, bahwa DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) mempunyai fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Kemudian pada pasal 78 disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya, Keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Selain Undang-undang diatas, pengawasan terhadap anggaran juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 132 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut merupakan tindakan DPRD untuk mengawasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini dimaksudkan supaya APBD dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan efisien dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka DPRD diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengawasan DPRD sangat diperlukan dalam pelaksanaan tata kelola

pemerintahan yang baik, karena DPRD merupakan representasi rakyat dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan kebijakan publik lainnya secara konsisten. Selain itu, pengawasan memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik (*check and balances*) antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif (Nuraini, 2017:26).

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja. Menurut Dewi (2011:39) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD tersebut juga menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD antara lain:

- a. Hak Interpelasi, yaitu menggunakan usulan sekurang-kurangnya (5) lima anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kekayaan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
- b. Hak Angket, yaitu sekurang-kurangnya (5) lima orang anggota DPRD dapat menggunakan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
- c. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat.

Kaho (2001) dalam Dewi (2011:39) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD mempunyai hak, yaitu:

- a. Untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Gubernur, Walikota, dan Bupati.
- b. Berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah.
- c. Melakukan pemeriksaan.
- d. Memberikan usulan-usulan.
- e. Menanyakan pertanyaan dari masing-masing anggota.

DPRD mempunyai posisi, tugas dan fungsi yang penting dalam pengawasan APBD. Pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan. Tahapan fungsi pengawasan DPRD tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pada tahap ini DPRD mempunyai peran dalam melakukan kegiatan antara lain: menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut, melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna), dan mengambil keputusan dan pengesahan.
- b. Pelaksanaan, peran DPRD dalam pengawasan direalisasikan melalui evaluasi terhadap APBD. Pengawasan ini dilaksanakan melalui *monitoring* dan pengawasan triwulan.
- c. Pelaporan, peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi lapangan.

Keuangan daerah sebagaimana yang sudah tercantum dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kemudian disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Dewi, 2011:42). Target yang ditetapkan dalam APBD bersumber dari pendapatan/ penerimaan daerah. Sedangkan pengeluaran dan belanja pemerintah daerah yang membebani daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan sejumlah dana dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, APBD digunakan sebagai dasar kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). APBD digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata pemerintahan pemerintah daerah. Sejak ditetapkan

pelaksanaan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBN, kemudian selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu tahun anggaran.

Menurut Kawedar, dkk (2008) dalam Nuraini (2017:30) APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran Negara/ daerah, antara lain:

- 1) Kesatuan, azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara/ daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- 2) Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- 3) Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
- 4) Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
- 6) Kas, azas ini menghendaki suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah.

APBD yang baik hendaknya disusun sesuai dengan prinsip-prinsip (azas) yang telah dijelaskan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, yaitu jalannya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Siklus penganggaran sector publik ada 4 tahap (Sujarweni, 2015:33-36), yaitu:

- 1) Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*), pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Penjelasan tentang tahap persiapan dalam penyusunan APBD yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat dokumen tentang perencanaan daerah yang terdiri dari Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA).
- 2) Tahap Ratifikasi Anggaran, pada tahap ini pihak eksekutif (pemerintah daerah) tidak hanya diminta untuk mempunyai kemampuan manajerial, tetapi juga harus mempunyai kemampuan di bidang politik, membangun kerjasama dan koalisi.
- 3) Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*), pada tahap pelaksanaan ini, APBD yang telah disahkan kemudian dilaksanakan/diimplementasikan dalam kehidupan pemerintahan daerah, tetapi harus tetap disesuaikan dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal yang ada dalam pemerintahan daerah tersebut.
- 4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran, setelah tahap persiapan, tahap ratifikasi, dan tahap pelaksanaan, kemudian selanjutnya adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka

diharapkan pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran ini tidak menemui banyak masalah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan pengawasan dijelaskan mengenai fungsi DPRD yaitu kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan bukan pemeriksaan. Dari penjelasan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Amalia, 2013:28)

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan seperti itu, dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan anggaran.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Amalia, 2013:28).

Pengawasan dilakukan dalam keseluruhan tahapan APBD, yaitu pada tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan akuntabilitas. Menurut (Amalia, 2013:28) dijelaskan bahwa tujuan pengawasan

APBD adalah untuk 1) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, 2) Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 ayat 1 (h) dijelaskan bahwa DPRD diberi hak untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai hak meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini merupakan hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Dengan demikian, sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dan semakin luas dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Dewi, 2011:46). Sehingga dengan penjelasan tersebut, DPRD sebagai pihak legislatif dituntut untuk dapat benar-benar menjalankan fungsinya yaitu menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah tersebut secara efektif dan efisien.

2.1.3. Partisipasi Masyarakat

2.1.3.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang ataupun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan sampai pada tahap evaluasi. Pengertian partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Ach Wazir merupakan keterlibatan seseorang yang dilakukan secara sadar di dalam sebuah interaksi sosial pada situasi tertentu. Lalu partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah

keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses identifikasi masalah dan potensi yang masyarakat miliki, seperti dalam hal pemilihan umum, pengambilan keputusan mengenai sebuah solusi alternatif untuk menangani persoalan tertentu, pelaksanaan usaha-usaha dalam mengatasi permasalahan, dan juga keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi terhadap perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang *incidental*.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentu strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Menurut Davis, pengertian partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau

moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya Negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun Negara.

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Simson, dkk 2007) dalam (Nuraini, 2017:31).

Partisipasi masyarakat tersebut dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu keterlibatan masyarakat dalam hal memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, kritik dan saran masyarakat yang dapat menentukan strategi dan prioritas APBD, serta partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam advokasi anggaran dan penyusunan APBD.

2.1.3.2. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi

sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Seperti dijelaskan dibawah ini;

1. Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam

kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi untuk insentif materil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator dan lain sebagainya) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini

cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

7. *Self mobilization*, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada

2.1.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (1967) seperti dikutip oleh Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- a. Usia, faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai

dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

- b. Jenis kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
- c. Pendidikan, dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Pekerjaan dan penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.1.4. Latar Belakang Individu

Latar belakang individu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:32). Setiap anggota dewan yang terpilih mempunyai latar belakang individu yang berbeda-beda sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Dengan mengetahui lebih dalam latar belakang individu anggota dewan akan membantu menilai kinerja para anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:35). Latar belakang individu adalah latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Latar belakang ini dapat mencerminkan kualitas seorang individu tersebut. Adanya latar belakang individu yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dalam penelitian ini latar belakang individu tersebut memiliki beberapa indikator antara lain:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang

dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas.

2. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan berkaitan dengan jurusan yang diambil pada saat duduk dibangku perkuliahan. Latar belakang pendidikan dari anggota dewan dapat membantu dalam pekerjaannya sebagai pengawas keuangan daerah.

3. Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi yang dimaksud disini adalah organisasi yang pernah digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Pengalaman organisasi ini umumnya terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), non-LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Pengalaman organisasi yang diperoleh baik sebelum dan sesudah menjadi anggota dewan juga berpengaruh pada kinerja anggota dewan. Semakin banyak pengalaman organisasi yang diperoleh maka dalam melaksanakan tugasnya anggota dewan akan memiliki keahlian dalam menangani kasus-kasus tertentu.

4. Pengalaman di DPRD

Merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Semakin lama seorang anggota dewan menjadi anggota DPRD akan memberikan pengalaman dan keahlian dalam menangani kasus-kasus tertentu.

5. Lama kerja di pemerintahan

Lama kerja di pemerintahan merupakan lama waktu yang telah dijalani oleh seorang individu yang bekerja dalam lingkup pemerintahan. Waktu yang dijalani oleh seseorang dalam lingkup kerja di pemerintahan juga merupakan proses belajar seseorang yang akan memberikan pengalaman dalam suatu organisasi atau kelompok, dalam hal ini adalah lingkup pemerintahan. Lama kerja di pemerintahan akan membantu dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota dewan.

6. Pelatihan tentang keuangan daerah

Pelatihan tentang keuangan daerah berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh anggota dewan yang berhubungan dengan keuangan daerah. Pelatihan juga merupakan proses belajar yang dapat meningkatkan intelektual dan pemahaman anggota dewan tentang keuangan daerah. Semakin sering mengikuti pelatihan tentang keuangan daerah maka akan menambah pengetahuan anggota dewan tentang keuangan daerah dan akan mengoptimalkan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah.

2.1.5. Latar Belakang Politik

Latar belakang politik merupakan pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Latar belakang politik dalam pembahasan ini meliputi pengalaman di DPRD, asal partai politik koalisi, dan asal komisi anggaran. Lembaga DPRD memiliki *political background* seperti individu yang ada di dalamnya. Karakteristik utama dari latar belakang politik adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Oleh

karena itu, latar belakang politik menjadi pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (Nuraini,2017:38).

Menurut (Dewi. 2011:60) faktor pengalaman politik yang mempengaruhi perilaku legislatif dalam melaksanakan fungsinya difokuskan ke dalam beberapa indikator, yaitu:

- 1) **Pengalaman Politik**, merupakan pengalaman anggota dewan dibidang politik atau lama menjabat dipartai politik.
- 2) **Asal Partai Politik**, merupakan asal partai dari anggota dewan yang terpilih. Partai politik yang dimaksud di sini adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai sebagai peserta pemilu. Partai-partai tersebut memperoleh suara terbanyak dalam pemilu dan mendapatkan kursi bagi kadernya di Lembaga DPRD. Di lembaga legislatif daerah, peran partai politik juga sangat signifikan dan menentukan. Melalui fraksinya yang merupakan perwakilan partai politik di lembaga legislatif, parpol merupakan institusi yang mengarahkan, bahkan menentukan pengambilan keputusan di DPRD.
- 3) **Jabatan di Partai Politik**, merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik yang dilihat dari keikutsertaannya sebagai pengurus di dalam partai politik.
- 4) **Asal Komisi**, yaitu asal komisi anggota dewan di DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 356 (b) menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi. Semua

DPRD yang menjadi sampel terdiri dari 4 (empat) komisi yaitu Komisi A, B, C, dan D.

2.1.6. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain (Nuraini, 2017:40). Pemahaman regulasi menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami regulasi agar dapat memastikan keuangan daerah sudah berjalan sesuai tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Nur dan Bambang (1999) dalam Mutia (2014:6) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan.

Beberapa peraturan, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam pengawasan keuangan daerah terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Witono dan Baswir (2003) dalam Dewi (2011:66) menyatakan bahwa jumlah peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap disfungsi individu dan organisasi, serta membunuh inisiatif individu, mengeliminasi perilaku *risk-taking*, mengurangi kepuasan kerja serta memicu sinisme dan persaingan.

Selain itu, pemahaman regulasi anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang

APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman regulasi mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut (Dewi, 2011:67). Sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan atau tidak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena peneliti ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena beberapa variable, objek, periode waktu yang digunakan dan penentuan sampel berbeda maka dapat banyak hal yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

Tabel 2.1
Hasil Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aditya (2012)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang	Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah

Lanjutan Tabel 2.1

		Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Di DPRD Kab. Boyolali)	
2	Isma (2012)	Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah	Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
3	Kartikasari (2012)	Pengaruh <i>Personal Background</i> , <i>Political Background</i> , Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)	<i>Political background</i> dan pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan <i>personal background</i> tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
4	Mayasari (2012)	Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating	Kualitas anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Kualitas anggota dewan ditunjukkan dengan tingkat pendidikan formal dan non formal, pelatihan tentang keuangan dan anggaran daerah, pengalaman dalam bidang organisasi dan politik praktis serta pengalaman sebagai anggota dewan. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas anggota

Lanjutan Tabel 2.1

			dewan dengan pengawasan APBD. Dewan dengan pengawasan APBD.
5	Anisa Fitriani (2013)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Surakarta)	Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah.
6	Rosita (2014)	Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik. (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan).	<i>Political background</i> dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Tranparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara <i>political background</i> dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
7	Mutia Nuarta (2014)	Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kab. Karanganyar)	Latar belakang personal berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Latar belakang politik berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Budaya politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Lanjutan Tabel 2.1

8	Nisa Dan Ririn Irmadariyani (2016)	Pengaruh <i>Personal Background</i> dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)	<i>Personal background</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
9	Dwiva Ulan Sari (2016)	Pengaruh <i>Personal Background</i> , <i>Political Background</i> dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota/Kabupaten Solok)	<i>Personal background</i> dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan <i>political background</i> berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
10	Nuraini (2017)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). (Studi Empiris Pada: Anggota DPRD Provinsi Riau).	Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Terdapat pengaruh latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Terdapat pengaruh latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Terdapat pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Sumber : Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2019

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Simson, dkk 2007) dalam (Nuraini, 2017:49).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan, misalnya pada saat pelaksanaan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan usulan masyarakat dikategorikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Itu berarti adanya keterlibatan masyarakat dalam rangka penyusunan APBD demi tercapainya akuntabilitas dan transparansi publik serta peran Anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat tersebut diharapkan bisa membantu peran Anggota DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya (2012) menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Menurut Aditya (2012:13) partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2012) yang menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Simson, dkk 2007) menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD. Karena perbedaan hasil penelitian terdahulu inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan unit analisis yang berbeda menggunakan variabel independennya Partisipasi Masyarakat.

H₁ : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peran Anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2.3.2. Pengaruh Latar Belakang Individu Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Latar belakang individu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia seorang individu yang menjadi ujung tonggak sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:32). Setiap anggota dewan yang terpilih mempunyai latar belakang individu yang berbeda-beda sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Dengan mengetahui lebih dalam latar belakang anggota dewan akan membantu menilai

kinerja para anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winarna dan Murni, 2007) dalam (Amalia 2013:35). Latar belakang individu adalah latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Latar belakang ini dapat mencerminkan kualitas seorang individu tersebut. Adanya latar belakang individu yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Hubungan antara Latar Belakang Individu dengan Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah adalah apabila latar belakang individu yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sesuai dengan pekerjaan yang ia geluti sekarang, maka perannya dalam pengawasan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik. Contohnya saja relevansi bidang pendidikan, artinya kesesuaian bidang pendidikan anggota DPRD dengan perannya dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa dan Irmadaryani (2016) menunjukkan bahwa *Personal background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menemukan bahwa *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) bahwasanya *personal background* tidak berpengaruh

terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Karena perbedaan hasil penelitian inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan unit analisis yang berbeda menggunakan variabel independennya Latar belakang individu.

H₂ : Latar belakang individu berpengaruh signifikan terhadap peran Anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2.3.3. Pengaruh Latar Belakang Politik Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Latar belakang politik ini meliputi pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, dan asal komisi anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharuskan untuk mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai komisi masing-masing. Perbedaan latar belakang politik sering menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat bahkan perselisihan antar anggota DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang sesuai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik, dan sifat pemilih (La Palombara 1974 dalam (Amalia 2013:6).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) dan Rosita (2014) menemukan bahwa *political background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menemukan bahwa *Political background* tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan

keuangan daerah. Karena adanya perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk memasukkan variabel latar belakang politik ke dalam penelitian.

H₃ : Latar belakang politik berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2.3.4. Pengaruh Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain (Kartikasari, 2012:13). Pemahaman regulasi menjadi pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami regulasi agar dapat memastikan keuangan daerah sudah berjalan sesuai tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Pemahaman regulasi anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman regulasi mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota

dewan harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut (Dewi, 2011:66-67). Sehingga, anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan atau tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2012) menemukan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

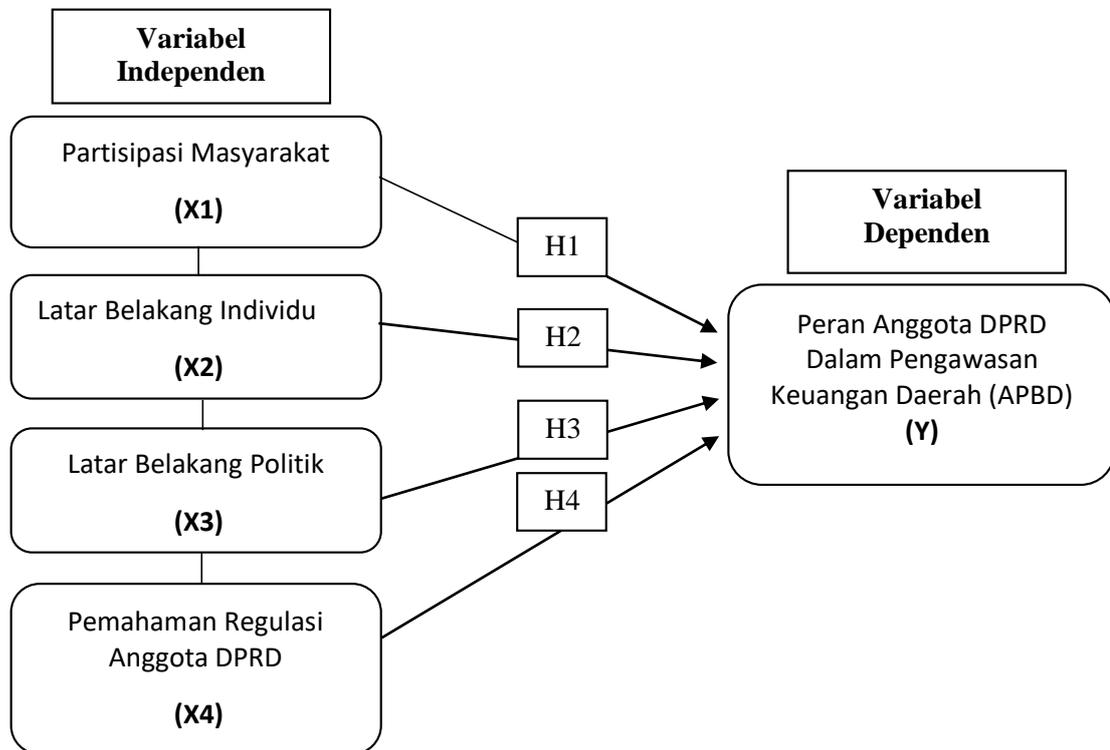
H₄ : Pemahaman regulasi berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2.4. Model Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Beberapa faktor tersebut antara lain partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik serta pemahaman regulasi anggota DPRD. Penelitian ini secara mendalam, akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Provinsi Riau berupa Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD.

Adapun Model penelitian ini di gambarkan pada model berikut ini:

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.5. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- H₂ : Latar belakang individu berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

- H₃ : Latar belakang politik berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- H₄ : Pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono (2018:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel bebas/independent (variabel yang mempengaruhi) dan variabel terikat/dependen (variabel yang dipengaruhi). Dalam penelitian ini akan menggambarkan pengaruh partisipasi masyarakat (X1), latar belakang individu (X2), latar belakang politik (X3) dan pemahaman regulasi anggota DPRD (X4) terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y). Menurut Sugiono (2017:35) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan mengambil beberapa lokasi sebagai wilayah penelitian sesuai dengan populasi dan sampel penelitian antara lain:

1. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
2. Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang beralamat di Jl. Gatot Subroto KM. 7 Teluk Kuantan.
3. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Beberapa tempat atau rumah Tokoh Masyarakat yang berada di sekitaran daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian terhadap pengaruh partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dari Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Juli 2020 sebagai berikut:

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017: 80).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Periode 2019-2024 dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2. Sampel

Menurut Sugiono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling*) tepatnya pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*). Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:130), pemilihan sampel dengan metode nonprobabilitas atau secara tidak acak, elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:131), pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) digunakan karena peneliti mempunyai tujuan atau target tertentu dalam

memilih sampel secara tidak acak. Adapun tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang ada di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah yang 35 orang, karena di dalam UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 46 ayat 1 Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran. Alasan dipilihnya sampel tersebut karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan dan pengawasan terhadap keuangan daerah yang dalam hal ini adalah APBD. Nama-nama anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 2019-2024 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.2
Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 2019-2024

No	Nama	Partai	Jabatan Fraksi	Dapil
1	Andi Putra, SH., MH	Golkar	Anggota	I
2	Juniwanti	PDIP	Anggota	I
3	Drs. H. Darmizar	PPP	Ketua	I
4	Muslim, S.Sos., M.Si	Nasdem	Ketua	I
5	Agung Rahmat	PKB	Sekretaris	I
6	Gusmir Indra	Gerindra	Ketua	I
7	Aprison	PAN	Ketua	I
8	Romi Alfisah Putra, SE	Golkar	Anggota	I
9	Syafril, ST	PKS	Ketua	I
10	Weri Naldi	Demokrat	Wakil Ketua	I
11	Sastra Febriawan, S.Pi., M.Si	Golkar	Wakil Ketua	II
12	Jepriadi	PAN	Sekretaris	II
13	Zulhendri A.Md	PPP	Anggota	II

Lanjutan Tabel 3.2

14	Solehudin, S.Sos	Gerindra	Sekretaris	II
15	Riko Nanda	Nasdem	Sekretaris	II
16	Aswimar, SE., ME	PKB	Ketua	II
17	Darwis, ST	Hanura	Sekretaris	II
18	Dr. Adam, SH,. MH	Golkar	Ketua	II
19	H. Supriyanto	PKS	Anggota	II
20	Jefri Antoni, ST	Demokrat	Anggota	II
21	Maspar Mahmur, SE	PAN	Anggota	II
22	H. Hamzah Alim	Demokrat	Sekretaris	III
23	Azrori Analke Apas	PPP	Sekretaris	III
24	Gamal Harsum	Nasdem	Anggota	III
25	Juprizal, SE,. M.Si	Gerindra	Anggota	III
26	Erdizal Is	PKB	Anggota	III
27	Satria Mandala Putra, M.Si	PDIP	Ketua	III
28	H. Sutoyo	Golkar	Anggota	IV
29	Mahmudi, S.IP	PDIP	Sekretaris	IV
30	Fedrios Gusni	Demokrat	Ketua	IV
31	Hisron	Gerindra	Wakil Ketua	IV
32	Jhonson Sihombing	Nasdem	Wakil Ketua	IV
33	Hengki Rustop, S.Sos	PAN	Wakil Ketua	IV
34	Naswan, SE	PPP	Sekretaris	IV
35	Endri Yupet	Golkar	Sekretaris	IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, 2019.

Untuk meningkatkan obyektivitas persepsi, pihak internal atau anggota DPRD peneliti menambahkan pihak eksternal dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kriteria yang digunakan untuk pihak eksternal dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi ditentukan sebagai berikut:

Masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintah merupakan pihak yang ikut mengawasi keuangan daerah. Masyarakat juga ikut andil atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, penyusunan RAPBD serta pengawasan keuangan daerah. Namun, tidak semua masyarakat dapat menjadi sampel dalam penelitian ini dan tidak semua masyarakat mengerti dan dapat merepresentasikan mengenai pengawasan keuangan daerah. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas data akan dipilih individu-individu atau kelompok yang representatif mewakili masyarakat, yaitu:

a. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat diambil sebagai sampel dalam penelitian ini karena tokoh masyarakat sangat merepresentasikan masyarakat. Tokoh masyarakat yang diambil sebagai sampel adalah 7 orang tokoh masyarakat yang pernah mengikuti MUSREMBANG.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM berfungsi sebagai wadah untuk menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan. LSM yang dipilih adalah LSM yang pernah menyoroti proses penganggaran, penyajian laporan keuangan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 4 LSM dengan mengambil 2 orang dari masing-masing LSM.

- c. Mahasiswa UNIKS angkatan 2015 dan 2016 yang memiliki IPK lebih dari 3,70 dan telah mengambil mata kuliah akuntansi pemerintahan dan penganggaran (*budgeting*) berjumlah 10 orang.

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner secara langsung.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisisioner. Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka (Sugiono, 2010:15).

3.4.2. Sumber Data

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para anggota DPRD dan masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari:

1. Data primer, yaitu data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2002:146). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuisisioner.

2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2002:147). Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2018:142). Adapun isi kuisisioner instrument penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas:

- 1) Profil responden, meliputi nama, nama instansi, jenis kelamin, umur dan Pendidikan terakhir.
- 2) Daftar pertanyaan, meliputi pertanyaan mengenai indikator variabel penelitian. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka dan tertutup (Sugiono, 2018:143).

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, literatur, ataupun artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoritis untuk melakukan pembahasan.

3. Mengakses *Website* dan Situs-Situs, metode ini digunakan untuk mencari *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mencari hubungan/pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya maka variabel didefinisikan secara operasional. Dalam penelitian ini digunakan 5 variabel. Variabel tersebut adalah partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik, pemahaman regulasi anggota DPRD dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel independen (*independent variable*) dan variabel dependen (*dependent variable*) yang diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert (*likert scale*) merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indrianto dan Supomo, 2002:104). Untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. Dalam skala likert variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel:

3.6.1. Variabel Penelitian

3.6.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiono, 2018:39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) adalah Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

1. Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah (APBD). Variabel ini menggunakan 4 item pernyataan yang menanyakan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD pada setiap tahapan APBD. Pengukuran variabel dengan skala likert 1 sampai dengan 5, yaitu: 1= TP (Tidak Pernah); 2= J (Jarang); 3= N (Netral); 4= SR (Sering); dan 5= SL (Selalu).

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang dibuat oleh Sopinah (2002) dan dikembangkan oleh Nuraini (2017), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan situasi dan teori yang terkait. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan dewan dalam memantau perencanaan keuangan daerah (APBD).
- 2) Evaluasi yang dilakukan dewan terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
- 3) Keterlibatan dewan dalam memantau penyusunan keuangan daerah (APBD).
Permintaan keterangan oleh dewan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan kepala daerah.

3.6.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2018:39). Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah partisipasi

masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD.

1. Partisipasi Masyarakat (X1)

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Nuraini, 2017:61).

Pengukuran variabel ini menggunakan Skala Likert (*LikertScale*), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1–5 kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi *score* atau bobot yaitu banyaknya *score* antara 1 sampai 5. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dihitung menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, responden akan menjawab dari Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= N (Netral), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Sopinah (2002) dalam Nuraini (2017).

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam hal memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- 2) Kritik dan saran masyarakat yang dapat menentukan strategi dan prioritas APBD.
- 3) Partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam rangka menyusun APBD.
- 4) Partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam advokasi anggaran.

- 5) Koordinasi antara dewan, masyarakat dan eksekutif atas rancangan APBD.
- 6) Saran dan kritik masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam merevisi anggaran.
- 7) Sosialisasi antara dewan dengan masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD.

2. Latar Belakang Individu (X2)

Latar Belakang Individu adalah latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Latar Belakang Individu dalam penelitian ini adalah pendapat anggota dewan mengenai latar belakang yang dapat mendukung peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Latar belakang tersebut berupa tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Kuesioner yang diajukan terdiri dari 10 pertanyaan yang bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia (2013) dalam Nisa (2016). Pertanyaan tersebut meliputi pengaruh jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, masa jabatan dan pengalaman kerja di DPRD dari anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah (APBD). Dari kuesioner yang diajukan diharapkan mampu menggambarkan pengaruh *personal background* terhadap peran anggota DPRD sebagai pengawas keuangan daerah. Dalam penelitian ini latar belakang individu dihitung menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, responden akan menjawab dari Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= N (Netral), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

3. Latar Belakang Politik (X3)

Latar belakang politik merupakan pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Latar belakang politik yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi anggota dewan, jabatan di partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarahan tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab legislatif dengan baik dan benar, serta sejauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh anggota DPRD.

Pengukuran variabel ini menggunakan Skala Likert (*LikertScale*), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1–5 kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi *score* atau bobot yaitu banyaknya *score* antara 1 sampai 5. Dalam penelitian ini latar belakang politik dihitung menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, responden akan menjawab dari Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= N (Netral), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Latar belakang politik ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Reza (2014), yaitu:

- 1) Pengalaman yang cukup di bidang politik.
- 2) Keaktifan dalam keikutsertaan sebagai pengurus di partai politik.
- 3) Pemahaman tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif.
- 4) Sejauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh anggota DPRD.

4. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)

Pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert, dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1–5 kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi *score* atau bobot yaitu banyaknya *score* antara 1 sampai 5. Dalam penelitian ini pemahaman regulasi anggota DPRD dihitung menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, responden akan menjawab dari Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= N (Netral), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman regulasi ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Reza (2014), yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.6.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik (Indrianto dan Supomo, 2002:69). Definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3
Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)	Hasil dari kegiatan/program yang dicapai oleh anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap APBD yang didasarkan atas kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut	Peran anggota dewan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaporan dan pengawasan APBD.
Partisipasi Masyarakat (X1)	Persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan	Keterlibatan masyarakat dalam hal memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, kritik dan

Lanjutan Tabel 3.3

	kebijakan, penentuan strategi , prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan.	saran masyarakat yang dapat menentukan strategi dan prioritas APBD, partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam advokasi anggaran dan penyusunan APBD.
Latar Belakang Individu (X2)	Merupakan latar belakang diri yang melekat pada setiap individu.	Pengaruh jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, masa jabatan dan pengalaman kerja di DPRD
Latar Belakang Politik (X3)	Merupakan pengalaman anggota dewan dalam berorganisasi di bidang politik	Pengalaman di bidang politik, jabatan di partai, asal partai politik, sejauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh anggota DPRD
Pemahaman Regulasi (X4)	Pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak	Tingkat pemahaman anggota DPRD tentang peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Data Olahan, 2019.

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:102). Dalam penelitian ini digunakan instrumen berupa kuisisioner/angket (daftar pertanyaan)

guna mengumpulkan data dari responden. Kuisisioner yang digunakan merupakan kuisisioner adaptasi dari berbagai sumber yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Untuk mengukur setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini digunakan indikator atau item yang menggambarkan variabel yang diukur. Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert (*likert scale*) yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 104:1999). Skala likert dipergunakan jika peneliti ingin mendapatkan data mengenai bobot dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden, skala likert yang digunakan adalah skala likert 5 poin, yakni memiliki alternatif/tingkatan jawaban sebagai berikut (Efferin, 2008:109):

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata nilai indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan sesuai dengan skala likert yang digunakan:

1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>1,80-2,60= Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>2,60-3,40= Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>3,40-4,20= Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

>4,20-5,00= Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linier berganda. Teknik ini digunakan oleh peneliti, apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi, analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. (Sugiyono, 2014:277)

Menurut Sekaran dan Bougie, 2010 untuk penelitian yang menggunakan media kuesioner, perlu melakukan pengujian sebagai berikut:

3.8.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas diuji dengan menggunakan uji korelasi *Product Moment* yang dilaksanakan dengan bantuan program IBM SPSS 21 for windows. Analisis faktor yang digunakan dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah

sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Jika tingkat signifikan diatas 0,05 maka instrumen yang digunakan dalam masing-masing variabel tersebut tidak valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisiner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47) Pengukuran reliabilitastas konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi, pengukuran reliabilitas bertujuan untuk mengetahui ketetapan instrumen atau data yang diteliti. Data yang sudah diuji kevalidannya kemudian akan diuji dengan koefisien *Cronbanch Alpha* $\geq 0,6$ dengan bantuan komputer program IBM SPSS 21 for windows. Suatu instrument dikatakan reliabilitas jika rhitung lebih besar r tabel ($r_o > r_1$) dan nilai r positif.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Listiani, 2011). Pengujian asumsi klasik terdiri dari beberapa macam pengujian sebagai berikut :

3.9.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu

dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal *probability plot*. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:161). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018:163).

3.9.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2018:107).

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi regresi *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas* (Ghozali, 2013: 139).

3.9.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terdapat korelasi maka ada masalah autokorelasi, karena model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi di dalamnya. Menurut Ghozali (2011) autokorelasi muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Model regresi dikatakan random atau acak jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3.10 Uji Hipotesis

Setelah data dikumpulkan, diuji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dilakukan pengujian yang berhubungan dengan model statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Alat analisis untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut digunakan adalah analisis berganda (*multiple regression*). Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha^0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α^0 = Konstanta

X_1 = Partisipasi Masyarakat

X_2 = Latar Belakang Individu

X_3 = Latar Belakang Politik

X_4 = Pemahaman Regulasi Anggota DPRD

β = Koefisien regresi

ε = Error

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan *multiple regression* untuk masing-masing sampel. Serta melihat nilai p value, Uji F, koefisien determinasi (R^2), dan Uji-t.

3.10.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (Gozhali, 2005). Untuk

mempermudah analisa bisa langsung dari koefisien signifikan atau probabilitas yang ada. Dalam analisa ini digunakan $\alpha = 5\%$ artinya kemungkinan kesalahan hanya boleh jika $p < 5\%$, jika $p > 5\%$ model dianggap tidak signifikan. Nilai- p (peluang) untuk statistik ujinya $< \alpha$ (taraf nyata) yang telah ditetapkan biasanya pada taraf $\alpha = 5\%$. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara serentak variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara serentak variabel independen tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen.

3.10.2 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

1. Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
2. Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima

Berikut adalah pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis pertama (H_1)

H_0 : Partisipasi masyarakat secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan Keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

H_1 : Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan Keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Hipotesis kedua (H_2)

H_0 : Latar belakang individu secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan Keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

H_2 : Latar belakang individu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

3. Hipotesis ketiga (H_3)

H_0 : Latar belakang politik secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

H_3 : Latar belakang politik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

4. Hipotesis keempat (H_4)

H_0 : Pemahaman regulasi anggota DPRD secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

H₄ : Pemahaman regulasi anggota DPRD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

3.10.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R²) yang kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Untuk menentukan apakah variabel moderator beberapa peneliti membandingkan nilai koefisien determinasi (R²) masing-masing regresi. Regresi yang memiliki nilai R² lebih tinggi dianggap memiliki nilai prediktif yang lebih baik (Ghozali, 2013:226). Jika nilai koefisien determinasi (R²) lebih tinggi setelah dimoderasi oleh variabel moderator maka variabel moderator tersebut memperkuat hubungan antara variabel lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Terpilih Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai Bupati *definitive* periode 2001-2006. Detetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.124.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24.134. diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi. Namun selang dua bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia. Jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Asrul Ja'far yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.316 Tanggal 20 Agustus 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) Kecamatan dengan 151 pemerintahan desa/kelurahan, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kuantan Tengah
- b. Kecamatan Singingi

- c. Kecamatan Kuantan Mudik
- d. Kecamatan Kuantan Hilir
- e. Kecamatan Cerenti
- f. Kecamatan Benai

Sebelumnya hanya 6 (enam) Kecamatan, sekarang telah dimekarkan menjadi 15 kecamatan. Daftar Bupati yang telah memimpin Kabupaten Kuantan Singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang

1. Drs. H. Rusdji S. Abrus (1999-2001),
2. Drs. H. Asrul Ja'far (2001-2005),
3. H. Sukarmis (2006-2015),
4. Drs. H. Mursini, M.Si (2016 s/d sekarang).

Letak Geografis dan Demografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 101°02' sampai 101°55' bujur timur dan 0°00' lintang selatan dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah $\pm 7.656 \text{ km}^2$ (763.603Ha) atau 7,8% dari total luas Provinsi Riau. Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas 15 (lima belas) Kecamatan. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan menjadi kegiatan usaha ekonomi. Bahkan memiliki potensial yang dapat diunggulkan atau unggulan dalam beberapa sektor, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pertambangan, serta industri lainnya. Hal ini ditandai oleh daya lahan untuk

pengembangan dan ketersediaan bahan baku untuk pengembangan agroindustri dan industri rumah tangga. Berbagai jenis bahan tambang telah dikatakan termasuk pertambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual.

Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kuantan Singingi sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah suku Minang Kabau yang merupakan suku asli Kuantan. Diikuti oleh suku Melayu yang umumnya bermukim disekitar daerah perbatasan timur, serta para transmigran asli Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi di area perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sementara adalah 291.044 orang yang terdiri dari 149.368 laki-laki dan 141.676 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pertahun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 adalah sebesar 2,6%. Kecamatan Kuantan Hilir adalah Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,7%, disusul oleh Kecamatan Singingi dan Kuantan Tengah sebesar 3,9% dan 3,7% sementara itu. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Inuman sebesar 0,5%.

Keadaan Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Agama, Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat Melayu Kuantan. Suku pendatang dominan diantaranya suku Jawa yang data ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

b. Perekonomian

Sektor pertanian masih memegang peran penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi, kerbau, ayam, itik dan sebagainya. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntan batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu mangan dan kaolin.

Dibidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempeng karet, industri perabotan, pengolahan makanan tradisional dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

c. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 1945. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup untuk umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyak tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

d. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Pendidikan merupakan pokok yang tidak dapat diabaikan, maju mundurnya suatu daerah dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat itu sendiri, karena pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia.

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021”

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat sejahtera, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
- 2) Sejahtera adalah kondisi masyarakat dalam keadaan makmur dan tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib dan harmonis.
- 3) Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

2. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik dan prima.
- 2) Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
- 3) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saingan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
- 4) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
- 6) Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

Definisi Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih diarahkan pada pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkepastian hukum, diharapkan dapat

menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta dan pihak lainnya sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif adalah peningkatan sumber daya manusia penyelenggaraan pembangunan yang peka terhadap kebutuhan daerah dan memiliki kapabilitas serta kualitas dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yang bertanggungjawab sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.
- 3) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saingan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata adalah memprioritaskan pembangunan berdasarkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan mensinkronkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu bersaing dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kepada sektor pertanian dan pariwisata.
- 4) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan adalah dengan memanfaatkan segala potensi daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek fungsi lahan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata adalah meningkatkan pemerataan pembangunan di masyarakat yang didukung dengan peningkatan dan optimalisasi infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

- 6) Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya adalah mewujudkan suasana kehidupan beragama yang rukun, melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

4.1.3. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata sangat berperan penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan sistem karir dan sistem kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan alat kelengkapan Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Kedudukan Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretariat yang dalam tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut.

Uraian Tugas, Bagian/ Unit Kerja Sekretariat DPRD

i. Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian
- b. Sub Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan
- c. Sub Bagian Protokol dan Humas

Bagian umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris DPRD dalam menyiapkan fasilitas rapat, fasilitas perjalanan dinas, pengadaan barang dan kebutuhan DPRD, penataan atau pengaturan keamanan/ketertiban gedung/kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD pengurusan surat menyurat, pengurusan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD. Bagian umum dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi:

- a. Mempersiapkan tempat rapat, pertemuan/penerimaan tamu-tamu
- b. Mempersiapkan fasilitas termasuk kamar/kursi rapat dan tamu
- c. Mempersiapkan Perjalanan Dinas pimpinan dan anggota DPRD serta sekretaris dan staf Sekretariat DPRD
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga Dewan dan rumah jabatan Pimpinan DPRD

- e. Melakukan pemeliharaan gedung/ kantor/ rumah jabatan Pimpinan dan kendaraan dinas, serta barang inventaris lainnya
- f. Mengurus dan memelihara keamanan dan ketertiban kantor DPRD dan rumah jabatan Pimpinan DPRD
- g. Menyelenggarakan kegiatan Persidangan DPRD dan Sekretaris DPRD
- h. Mengadakan/ mengurus perlengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris dan staf Sekretariat DPRD
- i. Mengurus administrasi keanggotaan DPRD dan Sekretaris DPRD
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretariat DPRD mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas bagian umum
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

ii. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
- b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
- c. Sub Bagian Perundang-Undangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris DPRD dalam menyiapkan rapat-rapat, materi rapat, risalah/kesimpulan rapat, produk-produk hukum, koordinasi peninjauan/kunjungan kerja/studi banding DPRD.

Bagian persidangan dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi:

- a. Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat
- b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat
- c. Mengkoordinasikan rapat-rapat pelaksanaan rapat risalah
- d. Mempersiapkan kesimpulan dan catatan rapat-rapat

- e. Mempersiapkan risalah sementara rapat paripurna
- f. Mempersiapkan rancangan agenda/jadwal rapat
- g. Mempersiapkan administrasi peninjauan/kunjungan kerja/studi banding DPRD
- h. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai hal yang berkaitan dengan persidangan DPRD
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Umum DPRD

iii. Bagian Keuangan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan penyusunan rencana anggaran DPRD. Mengurus dan menata usahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD serta Sekretaris DPRD. Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu DPRD dalam menyusun rencana anggaran DPRD
- b. Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan peruntukan dan penggunaan keuangan Dewan dan Sekretaris DPRD menyusun rencana anggaran belanja Sekretaris DPRD
- c. Menyusun rencana anggaran belanja Sekretaris DPRD
- d. Melaksanakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- e. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

- f. Menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD
- g. Menyusun pembukuan/pertanggungjawaban Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

4.1.4. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

i. Visi

"Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD"

Penjelasan Visi:

Pelayanan disini adalah suatu upaya untuk membantu, menyiapkan, menyediakan, mengurus keperluan orang lain dalam hal ini Anggota DPRD, sedangkan Prima dalam pengertian Visi Sekretariat DPRD adalah suatu upaya memberikan bantuan (memfasilitasi) kegiatan Anggota DPRD secara maksimal.

ii. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat DPRD telah menyusun misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan administrasi yang maksimal;
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Meningkatkan disiplin aparatur dan Anggota DPRD;
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Anggota DPRD yang Optimal;
- e. Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

4.2. Deskripsi Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel. Teknik pengambilan data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel adalah pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiono, 2018:85). Kriteria tersebut adalah Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan Masyarakat dengan jumlah 60 orang. Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 15 Maret 2020 dan pengambilan kuesioner terakhir pada tanggal 30 Maret 2020. Jumlah kuesioner yang disebarakan berjumlah 60 kuesioner. Untuk melihat tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada table 4.1:

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Total kuesioner yang disebarakan	60	100%
2	Total kuesioner yang dikumpulkan kembali	60	100%
3	Total kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4	Total Kuesioner yang dapat diolah	60	100%

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan table 4.1 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 60 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 60 kuesioner atau 100%. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah 0 kuesioner atau 0%. Kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner disebarakan adalah 60 kuesioner atau 100%.

4.3. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh anggota DPRD sebanyak 35 orang dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) digunakan karena peneliti mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). Untuk meningkatkan obyektivitas persepsi, pihak internal atau anggota DPRD peneliti menambahkan pihak eksternal dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kriteria yang digunakan untuk pihak eksternal dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi di tentukan sebagai berikut:

Masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintah merupakan pihak yang ikut mengawasi keuangan daerah. Masyarakat juga ikut andil atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, penyusunan RAPBD serta pengawasan keuangan daerah. Namun, tidak semua masyarakat dapat menjadi sampel dalam penelitian ini dan tidak semua masyarakat mengerti dan dapat merepresentasikan mengenai pengawasan keuangan daerah. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas data akan dipilih individu-individu atau kelompok yang representatif mewakili masyarakat, yaitu:

d. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi

dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Oleh sebab itu, 7 orang tokoh masyarakat di ambil sebagai sampel dalam penelitian ini karena tokoh masyarakat dapat merepresentasikan masyarakat.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM berfungsi sebagai wadah untuk menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan. LSM yang dipilih adalah LSM yang pernah menyoroti proses penganggaran, penyajian laporan keuangan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 4 LSM dengan mengambil 2 orang dari masing-masing LSM.

f. Mahasiswa/i

Mahasiswa UNIKS angkatan 2015 dan 2016 yang memiliki IPK lebih dari 3,50 berjumlah 10 orang.

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner secara langsung.

4.4. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anggota DPRD dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi yang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan diawal dan sebanyak 60 responden yang mengembalikan kuesioner. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia responden terbagi dalam 3 kelompok dari 60 responden yaitu dibawah 30 tahun, 31 sampai 45 tahun dan diatas 45 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase (%)
< 30 Tahun	14	23,33%
30 – 45 Tahun	37	61,67%
> 45 Tahun	9	15%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden yang berusia di bawah 30 tahun berjumlah 14 orang atau 23,33%, responden yang berusia 30 sampai 45 tahun sebanyak 37 orang atau 61,67%, dan responden yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 9 orang atau 15%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak berdasarkan usia terdapat pada usia 30 sampai dengan 45 tahun sebanyak 37 orang atau 61,67% dan jumlah responden terkecil berada pada usia diatas 45 tahun sebanyak 9 orang atau 15%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok dari 60 responden yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
Laki-laki	49	81,67%
Perempuan	11	18,33%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 49 orang atau 81,67% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 11 orang atau 18,33%. Dapat disimpulkan bahwa dari tabel diatas bahwa jumlah responden terbanyak adalah laki-laki yaitu 49 orang atau 81,67% sementara perempuan sebanyak 11 orang 18,33%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan terbagi dalam 4 kelompok dari 60 responden yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat, Diploma (D3), Strata 1 (Sarjana) dan Strata 2 (Master). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase (%)
SLTA Sederajat	19	31,67%
D3	4	6,67%
S1	26	43,33%
S2	11	18,33%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat berjumlah 19 orang atau 31,67%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma (D3) berjumlah 4 orang atau 6,67%, responden dengan tingkat pendidikan Strata 1 (Sarjana) berjumlah 26 orang atau 43,33% dan responden dengan tingkat pendidikan Strata 2 (Master) berjumlah 11 orang atau 18,33%. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah responden terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan Strata 1 (Sarjana) sebanyak 26 orang dan jumlah responden terkecil adalah Strata 2 (Master) sebanyak 11 orang atau 18,33%.

4.5. Hasil Pengujian dan Analisis Data

4.5.1. Analisis Data dan Statistik Deskriptif Variabel

Menurut Ghazali (2018:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Analisis data dilakukan terhadap 60 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban responden untuk masing-masing variabel yaitu Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik, Pemahaman Regulasi Anggota DPRD dan Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Masyarakat (X1)	60	15	46	34.38	8.657
Latar Belakang Individu (X2)	60	15	46	33.67	8.140
Latar Belakang Politik (X3)	60	15	45	32.65	8.714
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)	60	15	45	32.62	8.722
Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	60	16	48	39.25	6.688
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden untuk variabel partisipasi masyarakat adalah 34.38, diperoleh standar deviasi 8.657. Variabel latar belakang individu dengan nilai rata-rata jawaban responden 33.67, diperoleh standar deviasi 8.140. Variabel latar belakang politik dengan nilai rata-rata jawaban responden 32.65, diperoleh standar deviasi 8.714. Variabel pemahaman regulasi anggota DPRD dengan nilai rata-rata jawaban responden 32.62, diperoleh standar deviasi 8.722. Variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan nilai rata-rata jawaban responden 39.25, diperoleh standar deviasi 6.688. Dilihat dari rata-ratanya, variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya.

Setelah data dikumpulkan, diseleksi kelengkapannya untuk dianalisis. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan secara keseluruhan

terhadap seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

4.5.1.1. Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Ada 10 pertanyaan didalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yaitu:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden terhadap Variabel Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

ITEM	TANGGAPAN RESPONDEN						RATA-RATA ITEM	KRITERIA PENILAIAN
	STS	TS	N	S	SS	TOTAL		
Y.1	-	3,3	26,7	45,0	25,0	100%	3,917	Baik
Y.2	-	3,3	15,0	56,7	25,0	100%	4,033	Baik
Y.3	-	3,3	13,3	48,3	35,0	100%	4,150	Baik
Y.4	3,3	1,7	23,3	61,7	10,0	100%	3,733	Baik
Y.5	-	5,0	18,3	53,3	23,3	100%	3,950	Baik
Y.6	-	6,7	18,3	55,0	20,0	100%	3,883	Baik
Y.7	1,7	3,3	21,7	56,7	16,7	100%	3,833	Baik
Y.8	3,3	1,7	18,3	48,3	28,3	100%	3,967	Baik
Y.9	-	5,0	21,7	46,7	26,7	100%	3,950	Baik
Y.10	3,3	1,7	16,7	65,0	13,3	100%	3,833	Baik
RATA-RATA VARIABEL	3,925							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah terdiri dari 3 Indikator dan 10 item pertanyaan. Untuk item anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD (Y.1) dan item analisis politik selalu dilakukan dalam penyusunan APBD (Y.2) sebagian besar responden menjawab

setuju sebesar 45% (Y.1) dan 56,7% (Y.2). Rata-rata item sebesar 3,917 (Y.1) dan 4,033 (Y.2) artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah kebijakan umum APBD adalah baik/sering dan analisis politik selalu dilakukan dalam penyusunan APBD adalah baik/sering.

Sementara untuk item anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD (Y.3), item anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah (Y.4), item anggota dewan aktif memantau proses perencanaan keuangan daerah (APBD) (Y.5), item anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban (Y.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48,3% (Y.3), 61,7 (Y.4), 53,3% (Y.5) serta 55% (Y.6). Rata-rata item sebesar 4,150 (Y.3), 3,733 (Y.4), 3,950 (Y.5) dan 3,883 (Y.6) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD adalah baik/sering. Untuk item anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah adalah baik/sering. Begitu juga dengan item anggota dewan aktif memantau proses perencanaan keuangan daerah (APBD) adalah baik/sering dan item anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban adalah baik/sering.

Sementara untuk tem anggota dewan melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah (Y.7) dan item anggota dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti apabila terjadi kejanggalaan dalam LPJ APBD (Y.8) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 56,7% (Y.7) dan 48,3% (Y.8). Rata-rata per item sebesar 3,833 (Y.7) dan 3,967 (Y.8) yang artinya item anggota dewan melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah adalah baik/sering dan item

anggota dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti apabila terjadi kejanggalaan dalam LPJ APBD adalah baik/sering.

Serta untuk item anggota dewan aktif dalam mengawasi penyusunan keuangan daerah (APBD) (Y.9) dan item anggota dewan aktif meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan (Y.10) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 46,7% (Y.9) dan 65% (Y.10). Rata-rata per item sebesar 3,950 (Y.9) dan 3,883 (Y.10) yang artinya item anggota dewan aktif dalam mengawasi penyusunan keuangan daerah adalah baik/sering dan item anggota dewan aktif meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan adalah baik/sering.

Dari 10 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah dimana item anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD (Y.3) adalah item yang memiliki rata-rata tertinggi sebesar 4,150. Sedangkan item anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah (Y.4) merupakan item dengan nilai rata-rata yang terendah 3,733.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 3,925. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten Kuantan Singing adalah baik/sering.

4.5.1.2. Partisipasi Masyarakat (X1)

Ada 10 pertanyaan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat yaitu:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)

ITEM	TANGGAPAN RESPONDEN						RATA-RATA ITEM	KRITERIA PENILAIAN
	STS	TS	N	S	SS	TOTAL		
X1.1	1,7	11,7	28,3	48,3	10,0	100%	3,533	Baik
X1.2	-	13,3	35,0	38,3	13,3	100%	3,517	Baik
X1.3	1,7	11,7	33,3	51,7	1,7	100%	3,400	Baik
X1.4	5,0	8,3	35,0	46,7	5,0	100%	3,383	Cukup Baik
X1.5	8,3	5,0	38,3	46,7	1,7	100%	3,283	Cukup Baik
X1.6	10,0	5,0	26,7	45,0	13,3	100%	3,467	Baik
X1.7	5,0	8,3	35,0	43,3	8,3	100%	3,417	Baik
X1.8	10,0	8,3	21,7	36,7	23,3	100%	3,550	Baik
X1.9	10,0	6,7	43,3	31,7	8,3	100%	3,217	Cukup Baik
X1.10	5,0	8,3	30,0	33,3	23,3	100%	3,617	Baik
RATA-RATA VARIABEL	3,438							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 Tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari 3 indikator dan 10 pertanyaan. Untuk item menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD (X1.1), item kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD (X1.2) dan item bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD (X1.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 48,3 % (X1.1), 38,3 % (X1.2) dan 51,7 % (X1.3). Rata-rata item sebesar 3,533 (X1.1), 3,517 (X1.2) dan 3,400 (X1.3)

yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD adalah baik/sering, untuk item kritik dan saran masyarakat menurut responden dapat menentukan strategi dan prioritas APBD adalah baik/sering dan untuk item partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka penyusunan APBD adalah baik/sering.

Sementara itu untuk item masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran (X1.4) dan untuk item saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD (X1.5) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 46,7 % (X1.4) dan 46,7% (X1.5). Rata-rata item sebesar 3,383 (X1.4) dan 3,283 (X1.5) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran adalah cukup baik / cukup sering dan untuk item antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengonsultasikan atas rancangan APBD adalah cukup baik / cukup sering.

Untuk item mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat selama ini menjadi hambatan partisipasi masyarakat dalam advokasi anggaran (X1.6), item pertemuan kelompok masyarakat, jejak pendapat dan kajian media massa serta diskusi publik efektif dalam penyusunan APBD (X1.7) dan item saran dan kritik dari masyarakat saya kira dapat dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran (X1.8) sebagian besar responden dalam penelitian ini menjawab setuju yaitu sebesar 45,0% (X1.6), 43,3% (X1.7) dan 36,7% (X1.8). Rata-rata item sebesar 3,467 (X1.6), 3,417 (X1.7) dan 3,550 (X1.8) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat selama ini menjadi hambatan partisipasi masyarakat dalam advokasi anggaran

adalah baik/sering, item pertemuan kelompok masyarakat, jejak pendapat dan kajian media massa serta diskusi publik efektif dalam penyusunan APBD adalah baik/sering dan item saran dan kritik dari masyarakat dapat dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran adalah baik/sering.

Untuk item jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD biasanya dewan mensosialisasikan dalam masyarakat (X1.9) sebagian besar responden menjawab netral yaitu sebesar 43,3% (X1.9) dan rata-rata item sebesar 3,217 (X1.9) yang artinya item jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD biasanya dewan mensosialisasikan dalam masyarakat adalah cukup baik / cukup sering dan untuk item menurut saya penjaringan aspirasi masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD (X1.X1.10) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 33,3% (X1.10) dan rata-rata item sebesar 3,617 (X1.10) yang artinya penjaringan aspirasi masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD adalah baik/sering.

Dari 10 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat dimana untuk item menurut saya penjaringan aspirasi masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD (X1.10) adalah item yang memiliki rata-rata item tertinggi sebesar 3,617 (X1.10). Sedangkan item jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD biasanya dewan mensosialisasikan dalam masyarakat (X1.9) merupakan item dengan nilai rata-rata item terendah sebesar 3,217 (X1.9).

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item

pernyataan partisipasi masyarakat (X1) sebesar 3,438. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat adalah baik/sering.

4.5.1.3. Latar Belakang Individu (X2)

Ada 10 pertanyaan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Latar Belakang Individu yaitu:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden terhadap Variabel Latar Belakang Individu (X2)

ITEM	TANGGAPAN RESPONDEN						RATA-RATA ITEM	KRITERIA PENILAIAN
	STS	TS	N	S	SS	TOTAL		
X2.1	3,3	10,0	35,0	41,7	10,0	100%	3,450	Baik
X2.2	3,3	11,7	33,3	45,0	6,7	100%	3,400	Baik
X2.3	6,7	6,7	43,3	41,7	1,7	100%	3,250	Cukup Baik
X2.4	5,0	10,0	30,0	48,3	6,7	100%	3,417	Baik
X2.5	5,0	10,0	38,3	40,0	6,7	100%	3,333	Cukup Baik
X2.6	5,0	8,3	36,7	36,7	13,3	100%	3,450	Baik
X2.7	3,3	8,3	36,7	36,7	15,0	100%	3,517	Baik
X2.8	6,7	11,7	26,7	48,3	6,7	100%	3,367	Cukup Baik
X2.9	8,3	6,7	40,0	41,7	3,3	100%	3,250	Cukup Baik
X2.10	3,3	11,7	46,7	35,0	3,3	100%	3,233	Cukup Baik
RATA-RATA VARIABEL	3,367							Cukup Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi keuangan daerah terdiri dari 4 indikator dan 10 item pertanyaan. Untuk item jenjang pendidikan anggota dewan mendukung dalam pelaksanaan tugas (X2.1) dan item latar belakang pendidikan anggota dewan dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan (X2.12) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 41,7% (X2.1) dan 45,0% (X2.2). Rata-rata item sebesar

3,450 (X2.1) dan 3,400 (X2.2) artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa jenjang pendidikan anggota dewan mendukung dalam pelaksanaan tugas adalah baik/sering dan item latar belakang pendidikan anggota dewan dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan adalah baik/sering.

Sementara untuk item pendidikan anggota dewan bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu (X2.3) sebagian besar responden menjawab netral sebesar 43,3% (X2.3) dan rata-rata item sebesar 3,250 (X2.3) artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan anggota dewan bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu adalah cukup baik / cukup sering. Untuk item pengalaman organisasi anggota dewan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota dewan saat ini (X2.4) dan item pengalaman organisasi anggota dewan mempengaruhi keahlian dalam melaksanakan tugas (X2.5) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 48,3% (X2.4) dan 40,0% (X2.5). Rata-rata item sebesar 3,471 (X2.4) dan 3,333 (X2.5) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengalaman organisasi anggota dewan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota dewan saat ini adalah cukup baik/sering dan pengalaman organisasi anggota dewan mempengaruhi keahlian dalam melaksanakan tugas adalah cukup baik / cukup sering.

Untuk item semakin lama anggota dewan mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan (X2.6) dan pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas (X2.7) sebagian besar responden menjawab netral dan setuju yaitu sebesar 36,7% (X2.6) dan 36,7% (X2.7). Rata-rata item sebesar 3,450 (X2.6) dan 3,517 (X2.7)

yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa semakin lama anggota dewan mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan adalah baik/sering dan pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas adalah baik/sering.

Untuk item masa kerja anggota dewan di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas (X2.8) dan anggota dewan telah mengikuti berbagai pelatihan tentang keuangan daerah (X2.9) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 48,3% (X2.8) dan 41,7 (X2.9). Rata-rata item sebesar 3,367 (X2.8) dan 3,250 (X2.9) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa masa kerja anggota dewan di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas adalah cukup baik / cukup sering dan anggota dewan telah mengikuti berbagai pelatihan tentang keuangan daerah adalah cukup baik / cukup sering. Dan item sertifikasi dari pelatihan keuangan daerah yang diperoleh anggota dewan dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas (X2.10) sebagian besar responden menjawab netral sebesar 46,7% dengan rata-rata item sebesar 3,233 (X2.10) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa sertifikasi dari pelatihan keuangan daerah yang diperoleh anggota dewan dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas adalah cukup baik / cukup sering.

Dari 10 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel latar belakang individu dimana untuk item pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas (X2.7) adalah item yang memiliki rata-rata tertinggi sebesar 3,517 (X2.7). Sedangkan item sertifikasi dari pelatihan keuangan daerah yang diperoleh anggota dewan dapat

mendukung dalam pelaksanaan tugas (X2.10) merupakan item dengan nilai rata-rata terendah sebesar 3,233 (X2.10).

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel latar belakang individu dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item pernyataan latar belakang individu (X2) sebesar 3,367. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa latar belakang individu adalah cukup baik.

4.5.1.4. Latar Belakang Politik (X3)

Ada 9 pertanyaan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Latar Belakang Politik yaitu:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden terhadap Variabel Latar Belakang Politik (X3)

ITEM	TANGGAPAN RESPONDEN						RATA-RATA ITEM	KRITERIA PENILAIAN
	STS	TS	N	S	SS	TOTAL		
X3.1	1,7	13,3	21,7	33,3	30,0	100%	3,767	Baik
X3.2	10,0	5,0	31,7	41,7	11,7	100%	3,400	Baik
X3.3	3,3	11,7	20,0	35,0	30,0	100%	3,767	Baik
X3.4	6,7	8,3	21,7	46,7	16,7	100%	3,583	Baik
X3.5	3,3	11,7	20,0	38,3	26,7	100%	3,733	Baik
X3.6	6,7	8,3	28,3	45,0	11,7	100%	3,467	Baik
X3.7	1,7	13,3	16,7	46,7	21,7	100%	3,733	Baik
X3.8	5,0	11,7	15,0	51,7	16,7	100%	3,633	Baik
X3.9	3,3	10,0	28,3	43,3	15,0	100%	3,567	Baik
RATA-RATA VARIABEL	3,628							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang politik terdiri dari 4 Indikator dan 9 item pertanyaan. Untuk item sebelum anggota

dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan telah memiliki pengalaman yang cukup di partai politik (X3.1), item sebelum anggota dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan aktif dalam keikutsertaan sebagai pengurus di partai politik (X3.2) dan item anggota dewan mendapatkan pembekalan dan informasi yang lengkap tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab sebagai anggota legislatif sebelum dan selama menjadi anggota dewan (X3.3) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 33,3% (X3.1), 41,7% (X3.2) dan 35,0% (X3.3). Rata-rata item sebesar 3,767 (X3.1), 3,400 (X3.2) dan 3,767 (X3.3) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa sebelum anggota dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan telah memiliki pengalaman yang cukup di partai politik adalah baik/sering, untuk item sebelum anggota dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan aktif dalam keikutsertaan sebagai pengurus di partai politik adalah baik/sering dan untuk item anggota dewan mendapatkan pembekalan dan informasi yang lengkap tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab sebagai anggota legislatif sebelum dan selama menjadi anggota dewan adalah baik/sering.

Sementara untuk item dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik, anggota dewan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari partai politik anggota dewan (X3.4), item untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD dengan baik, anggota dewan harus sudah pernah memegang jabatan dalam partai politik (X3.5) dan item jabatan anggota dewan dalam partai politik melatih tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas (X3.6) sebagian besar responden dalam penelitian ini menjawab setuju sebesar 46,7% (X3.4), 38,3% (X3.5) dan 45,0% (X3.6). Rata-rata item sebesar 3,583 (X3.4), 3,733 (X3.5) dan 3,467 (X3.6) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan

bahwa dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik, anggota dewan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari partai politik anggota dewan adalah baik/sering, begitu juga untuk item untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD dengan baik, anggota dewan harus sudah pernah memegang jabatan dalam partai politik adalah baik/sering dan item jabatan anggota dewan dalam partai politik melatih tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas adalah baik/sering.

Untuk item pengalaman menjabat di partai politik menjadikan anggota dewan lebih bijaksana (X3.7), item pengalaman anggota dewan di partai politik memberikan peluang bagi anggota dewan untuk melakukan suatu kecurangan (X3.8) dan item anggota dewan dalam mempertimbangkan usulan atau kebutuhan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan partai atau kepentingan partai lainnya (X3.9) sebagaimana besar responden menjawab setuju sebesar 46,7% (X3.7), 51,7 (X3.8) dan 43,3 (X3.9). Rata-rata item sebesar 3,733 (X3.7), 3,633 (X3.8) dan 3,567 (X3.9) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengalaman menjabat di partai politik menjadikan anggota dewan lebih bijaksana adalah baik/sering, begitu juga untuk item pengalaman anggota dewan di partai politik memberikan peluang bagi anggota dewan untuk melakukan suatu kecurangan adalah baik/sering dan untuk item anggota dewan dalam mempertimbangkan usulan atau kebutuhan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan partai atau kepentingan partai lainnya adalah baik/sering.

Dari 9 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel latar belakang politik dimana untuk item sebelum anggota dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan telah memiliki pengalaman yang cukup di partai politik (X3.1) dan item anggota dewan mendapatkan pembekalan dan informasi yang

lengkap tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab sebagai anggota legislative sebelum dan selama menjadi anggota dewan (X3.3) adalah item yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,767 (X3.1 dan 3). Sedangkan item sebelum anggota dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan aktif dalam keikutsertaan sebagai pengurus di partai politik (X3.2) merupakan item dengan nilai rata-rata terendah sebesar 3,400 (X3.X3.2).

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel latar belakang politik dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item pernyataan latar belakang politik (X3) sebesar 3,628. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa latar belakang politik adalah baik/sering.

4.5.1.5. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)

Ada 9 pertanyaan di dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Pemahaman Regulasi Anggota DPRD yaitu:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden terhadap Variabel Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)

ITEM	TANGGAPAN RESPONDEN						RATA-RATA ITEM	KRITERIA PENILAIAN
	STS	TS	N	S	SS	TOTAL		
X4.1	-	15,0	10,0	40,0	35,0	100%	3,950	Baik
X4.2	-	15,0	13,3	45,0	26,7	100%	3,833	Baik
X4.3	-	15,0	18,3	41,7	25,0	100%	3,767	Baik
X4.4	1,7	13,3	23,3	43,3	18,3	100%	3,633	Baik
X4.5	5,0	10,0	23,3	40,0	21,7	100%	3,633	Baik
X4.6	8,3	6,7	26,7	41,7	16,7	100%	3,517	Baik
X4.7	8,3	8,3	25,0	43,3	15,0	100%	3,483	Baik

Lanjutan Tabel 4.10

X4.8	6,7	8,3	26,7	46,7	11,7	100%	3,483	Baik
X4.9	11,7	3,3	33,3	43,3	8,3	100%	3,333	Cukup Baik
RATA- RATA VARIABEL	3,626							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman regulasi anggota DPRD terdiri dari 2 indikator dan 9 item pertanyaan. Untuk item anggota dewan memahami undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (X4.1), item anggota dewan memahami undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (X4.2) dan item anggota dewan memahami undang-undang no. 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (X4.3) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 40% (X4.1), 45% (X4.2) dan 41,7% (X4.3). Rata-rata item sebesar 3,950 (X4.1), 3,833 (X4.2) dan 3,767 (X4.3) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan item anggota dewan memahami undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah baik/sering. Begitu juga item anggota dewan memahami undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah baik/sering dan item anggota dewan memahami undang-undang no. 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah baik/sering.

Sementara itu untuk item anggota dewan memahami peraturan pemerintah no.16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib DPRD (X4.4), item anggota dewan memahami

peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (X4.5) dan item anggota dewan memahami peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (X4.6) sebagian besar responden dalam penelitian ini menjawab setuju sebesar 43,3% (X4.4), 40,0% (X4.5) dan 41,7% (X4.6). Rata-rata item sebesar 3,633 (X4.4), 3,633 (X4.5) dan 3,517 (X4.6) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa item anggota dewan memahami peraturan pemerintah no.16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib DPRD adalah baik/sering, begitu juga untuk item anggota dewan memahami peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah baik/sering dan untuk item anggota dewan memahami peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah baik/sering.

Untuk item anggota dewan memahami undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah (X4.7), item anggota dewan memahami keputusan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (X4.8) dan item anggota dewan memahami undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (X4.9) sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 43,3% (X4.7), 46,7% (X4.8) dan 43,3% (X4.9). Rata-rata item sebesar 3,483 (X4.7), 3,483 (X4.8) dan 3,333 (X4.9) yang artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa anggota dewan memahami undang-undang republic Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah adalah baik/sering, begitu juga untuk item anggota dewan memahami keputusan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2001

tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah baik/sering dan untuk item item anggota dewan memahami undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah cukup baik /sering.

Dari 9 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman regulasi anggota DPRD dimana untuk item anggota dewan memahami undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (X4.1) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,950 (X4.1). Sedangkan item anggota dewan memahami undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (X4.9) merupakan item dengan nilai rata-rata terendah sebesar 3,333 (X4.9).

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman regulasi anggota DPRD dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item pernyataan pemahaman regulasi anggota DPRD (X4) sebesar 3,626. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa pemahaman regulasi anggota DPRD adalah baik/sering.

4.5.2. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk uji dua sisi. Jika r hitung $>$ r tabel maka alat ukur yang digunakan dinyatakan valid dan sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel maka alat ukur yang digunakan dinyatakan tidak valid. Nilai r tabel dapat diperoleh dengan persamaan $N-2 = 60 - 2 = 58 = 0.2542$.

Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai *Pearson Correlation*. Nilai r hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Tetapi, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item pernyataan dalam penelitian ini tidak valid.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel dapat ditunjukkan sebagai berikut:

4.2.2.1. Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Validitas Variabel Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	PDDPKD 1	0.759	0.2542	VALID
	PDDPKD 2	0.784	0.2542	VALID
	PDDPKD 3	0.788	0.2542	VALID
	PDDPKD 4	0.897	0.2542	VALID
	PDDPKD 5	0.782	0.2542	VALID
	PDDPKD 6	0.884	0.2542	VALID
	PDDPKD 7	0.898	0.2542	VALID
	PDDPKD 8	0.839	0.2542	VALID
	PDDPKD 9	0.785	0.2542	VALID
	PDDPKD 10	0.857	0.2542	VALID

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dimana r_{hitung}

$> r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan dinyatakan valid. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 10 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10.

4.2.2.2. Partisipasi Masyarakat (X1)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	PPM1	0.866	0.2542	VALID
	PPM2	0.856	0.2542	VALID
	PPM3	0.907	0.2542	VALID
	PPM4	0.889	0.2542	VALID
	PPM5	0.901	0.2542	VALID
	PPM6	0.904	0.2542	VALID
	PPM7	0.874	0.2542	VALID
	PPM8	0.900	0.2542	VALID
	PPM9	0.845	0.2542	VALID
	PPM10	0.879	0.2542	VALID

Sumber : Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel partisipasi masyarakat dimana $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan dinyatakan valid. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 10 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10.

4.2.2.3. Latar Belakang Individu (X2)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Validitas Variabel Latar Belakang Individu

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Latar Belakang Individu (X2)	PLBI1	0.857	0.2542	VALID
	PLBI2	0.890	0.2542	VALID
	PLBI3	0.863	0.2542	VALID
	PLBI4	0.872	0.2542	VALID
	PLBI5	0.888	0.2542	VALID
	PLBI6	0.842	0.2542	VALID
	PLBI7	0.881	0.2542	VALID
	PLBI8	0.897	0.2542	VALID
	PLBI9	0.870	0.2542	VALID
	PLBI10	0.854	0.2542	VALID

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel latar belakang individu dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan valid. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 10 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10.

4.2.2.4. Latar Belakang Politik (X3)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Validitas Variabel Latar Belakang Politik

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Latar Belakang Poilitik (X3)	PLBP1	0.885	0.2542	VALID
	PLBP2	0.920	0.2542	VALID
	PLBP3	0.918	0.2542	VALID
	PLBP4	0.922	0.2542	VALID
	PLBP5	0.917	0.2542	VALID
	PLBP6	0.922	0.2542	VALID
	PLBP7	0.925	0.2542	VALID
	PLBP8	0.922	0.2542	VALID
	PLBP9	0.902	0.2542	VALID

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel latar belakang politik dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan valid. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 9 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9.

4.2.2.5. Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Validitas Variabel Pemahaman Regulasi Anggota DPRD

	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)	PPRAD1	0.936	0.2542	VALID
	PPRAD2	0.933	0.2542	VALID
	PPRAD3	0.915	0.2542	VALID
	PPRAD4	0.906	0.2542	VALID

Lanjutan Tabel 4.15

	PPRAD5	0.926	0.2542	VALID
	PPRAD6	0.932	0.2542	VALID
	PPRAD7	0.922	0.2542	VALID
	PPRAD8	0.893	0.2542	VALID
	PPRAD9	0.945	0.2542	VALID

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 terdapat perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} variabel pemahaman regulasi anggota DPRD dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan valid. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 9 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9.

4.5.3. Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Jadi, pengukuran reliabilitas bertujuan untuk mengetahui ketetapan instrument atau data yang diteliti. Sama halnya dengan pengujian validitas, pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach's Alpha*. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang digunakan sebagai indikator dari variabel. Jika koefisien *alpha* yang dihasilkan ≥ 0.6 , maka indikator tersebut dikatakan *reliable* atau dapat dipercaya. Perolehan *Cronbach's Alpha* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cutt Off</i>	<i>N of Items</i>	Kesimpulan
Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	0.948	0.60	10	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0.966	0.60	10	Reliabel
Latar Belakang Individu	0.964	0.60	10	Reliabel
Latar Belakang Politik	0.975	0.60	9	Reliabel
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	0.978	0.60	9	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrument peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD menunjukkan *cronbach alpha* yaitu 0.948, 0.966, 0.964, 0.975 dan 0.978. Dari kelima variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa lima variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau layak sebagai alat dalam pengumpulan data.

4.5.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam perhitungan regresi mungkin akan terjadi kesalahan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. Untuk itu, perlu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah

sah (tidak terdapat penyimpangan) (Jakaria, 2015:157). Berikut adalah uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

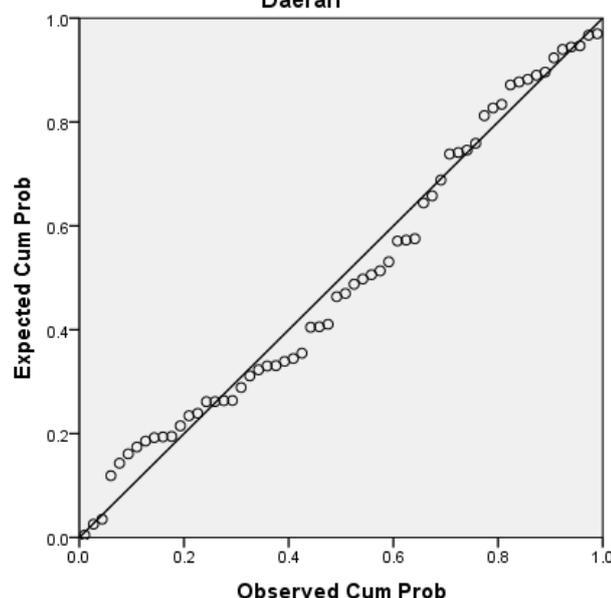
4.5.4.1. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik normal *probability plot*. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:161).

Dengan menggunakan normal *P- Plot* dapat dilihat apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018:163). Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah



Sumber: Data output SPSS,2020

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpecah dari garis diagonal) dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

4.5.4.2. Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2013:107), uji *multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengujian dilakukan secara statistik dengan bantuan SPSS versi 21.

Menurut Ghazali (2018:107), *multikolinieritas* dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai *tolerance* kurang dari atau sama dengan 0,10 ($\leq 0,10$) atau sama dengan nilai VIF lebih dari atau sama dengan 10 (≥ 10) maka terjadi gejala *multikolinieritas* sedangkan jika nilai *tolerance* lebih dari atau sama dengan dengan 0,10 ($\geq 0,10$) atau nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10 (≤ 10) maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2018:108). Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF)
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Partisipasi Masyarakat	.371	2.698
	Latar Belakang Individu	.651	1.536
	Latar Belakang Politik	.261	3.530
	Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	.241	2.200

a. Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

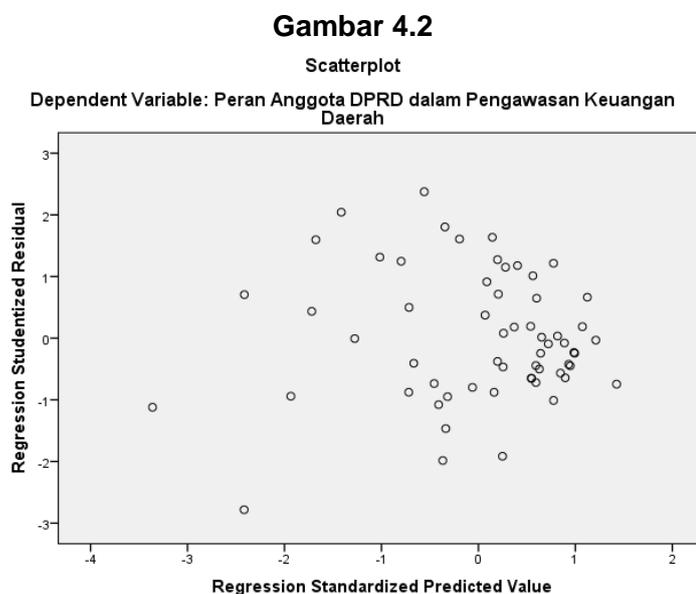
Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* semua variabel bebas (independen) > 0,10 (lebih dari 0,10) dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 (kurang dari 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinieritas antara variabel bebas (independen) dalam model regresi.

4.5.4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 139). Berdasarkan

analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan seperti gambar berikut :



Sumber: Data output SPSS,2020

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pernyataan menyebar dan tidak memperlihatkan pola tertentu pada *Scatter Plot* yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi penelitian ini sudah baik.

4.5.4.4. Hasil Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018:111), autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya). Dalam model regresi diharapkan tidak terjadi problem autokorelasi. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan *Durbin Watson* yang diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan uji *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika angka DW dibawah -2 berarti autokorelasi positif.

b. Jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat autokorelasi positif.

Tabel 4.18
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	<i>Durbin Watson</i>	Keterangan	Kesimpulan
Partisipasi Masyarakat (X1)	1.961	Nilai <i>Durbin Watson</i> (DW) 1.961 berkisar antara -2 sampai dengan +2	Bebas Autokorelasi
Latar Belakang Individu (X2)			Bebas Autokorelasi
Latar Belakang Politik (X3)			Bebas Autokorelasi
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)			Bebas Autokorelasi

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Dari tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1.961 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

4.5.5. Hasil Uji Hipotesis

4.5.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi analisis berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 21 akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis

regresi berganda yaitu menggunakan variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α_0 = Konstanta

X_1 = Partisipasi Masyarakat

X_2 = Latar Belakang Individu

X_3 = Latar Belakang Politik

X_4 = Pemahaman Regulasi Anggota DPRD

β = Koefisien regresi

ε = Error

Dari pengolahan data computer program SPSS versi 21, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.199	2.293		6.192	.000
Partisipasi Masyarakat	.233	.091	.301	2.561	.013
Latar Belakang Individu	.247	.073	.302	3.388	.001
Latar Belakang Politik	.865	.095	.461	3.003	.004

Lanjutan Tabel 4.19

Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	.603	.093	.307	2.897	.005
---------------------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable : Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.19 Diatas dapat disusun persamaan regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 4.199 + 0.233 X_1 + 0.247 X_2 + 0.865 X_3 + 0.603 X_4 + \varepsilon$$

α_0 = 4.199 adalah konstanta yang artinya apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah bernilai 4.199.

β_1 = 0.233 adalah nilai koefisien regresi partisipasi masyarakat, artinya adalah bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0.233 dengan asumsi variabel lain tetap.

β_2 = 0.247 adalah nilai koefisien regresi latar belakang individu, artinya adalah bahwa setiap peningkatan latar belakang individu sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0.247 dengan asumsi variabel lain tetap.

β_3 = 0.865 adalah nilai koefisien regresi latar belakang politik, artinya adalah bahwa setiap peningkatan latar belakang politik sebesar 1

satuan maka akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0.865 dengan asumsi variabel lain tetap.

β_4 = 0.603 adalah nilai koefisien regresi pemahaman regulasi anggota DPRD, artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemahaman regulasi anggota DPRD sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 0.603 dengan asumsi variabel lain tetap.

e = Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua factor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

4.5.5.2. Hasil Uji F

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka analisis yang dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output aplikasi SPSS 21. Menurut Ghozali (2018:98) dasar pengambilan keputusan uji F adalah:

- 1) Signifikan bila p value/nilai signifikan $< \alpha$ (0,05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)

- 2) Tidak signifikan bila p value/nilai signifikan $> \alpha$ (0,05) dan $F_{hitung} < F_{tabel}$, sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)

Tabel 4.20
Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1895.570	4	473.893	35.047	.000 ^b
Residual	743.680	55	13.521		
Total	2639.250	59			

a. Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Regulasi Anggota DPRD, Latar Belakang Individu, Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Politik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0.05 (5%), yaitu $0,000 < 0.05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} dimana dari tabel 4.20 Terlihat F_{hitung} sebesar 35,047, sedangkan F_{tabel} diperoleh dari $df(n1) = k - 1$ dan $df(n2) = n - k$, dimana:

$Df(n1)$ = *degree of freedom* sebagai pembilang

$Df(n2)$ = *degree of freedom* sebagai penyebut

k = jumlah variabel yang diteliti

n = jumlah data/responden/observasi

Dari rumusan diatas, diketahui jumlah responden sebanyak 60 responden dan terdapat 5 variabel yang diteliti sehingga diperoleh $df(n1) = 5 - 1 = 4$ dan $df(n2) = 60 - 5 = 55$ dengan tingkat signifikansi 5% (0.05) maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2,54.

Berdasarkan tabel 4.20 terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $35,047 > 2,54$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji hipotesis variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.5.5.3. Uji t

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka analisis yang dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output aplikasi SPSS 21, menurut Ghozali (2018:99) dasar pengambilan keputusan uji t adalah:

- 1) Signifikan bila p value/nilai signifikan $< \alpha$ (0,05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak (ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen)
- 2) Tidak signifikan bila p value/nilai signifikan $> \alpha$ (0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima (tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen)

Selanjutnya untuk nilai t_{tabel} diperoleh dari tabel t dimana tingkat signifikan 5%. Nilai t_{tabel} sebesar $t_{(\alpha/2 ; n-k)} = t_{(0,05/2 ; 60-5)} = t_{(0,025 ; 55)} = 2,004$ sedangkan nilai t_{hitung} dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.21
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		6.192	.000
Partisipasi Masyarakat	.301	2.561	.013
Latar Belakang Individu	.302	3.388	.001
Latar Belakang Politik	.461	3.003	.004
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	.307	2.897	.005

a. Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Dari tabel 4.17, uji parsial diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Variabel Partisipasi Masyarakat

H_1 : Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki t_{hitung} sebesar 2,561 dan t_{tabel} 2,004 dimana $2,561 > 2,004$ serta tingkat signifikansi sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten kuantan singingi. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah terbukti

dengan tingkat pengaruh sebesar 0,233. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan partisipasi masyarakat akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

b. Variabel Latar Belakang Individu

H₂ : Latar belakang individu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa variabel latar belakang individu memiliki t_{hitung} sebesar 3.388 dan t_{tabel} 2,004 dimana $3.388 > 2,004$ serta tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₂ diterima. Ini berarti latar belakang individu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten kuantan singingi. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan latar belakang individu berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah terbukti dengan tingkat pengaruh sebesar 0,247. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan latar belakang individu yang bagus akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

c. Variabel Latar Belakang Politik

H₃ : Latar belakang politik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa variabel latar belakang politik memiliki t_{hitung} sebesar 3.003 dan t_{tabel} 2,004 dimana $3.003 > 2,004$ serta

tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Ini berarti latar belakang politik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten kuantan singingi. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan latar belakang politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah terbukti dengan tingkat pengaruh sebesar 0.865. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan latar belakang politik yang bagus akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

d. Variabel Pemahaman Regulasi Anggota DPRD

H_4 : Pemahaman regulasi anggota DPRD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa variabel pemahaman regulasi anggota DPRD memiliki t_{hitung} sebesar 2.897 dan t_{tabel} 2,004 dimana $2.897 > 2,004$ serta tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Ini berarti pemahaman regulasi anggota DPRD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten kuantan singingi. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah terbukti dengan tingkat pengaruh sebesar 0.603. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman regulasi anggota

DPRD yang baik dalam memahami peraturan-peraturan yang ada akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan tabel diatas, hasil hipotesis uji t dapat dilihat pada rangkuman tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.22
Rangkuman Hasil Hipotesis

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Kesimpulan
Partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (H ₁)	2.561	2,004	0.013 < 0.05	H ₁ diterima
Latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (H ₂)	3.388	2,004	0.001 < 0.05	H ₂ diterima
Latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (H ₃)	3.003	2,004	0.004 < 0.05	H ₃ diterima
Pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (H ₄)	2.897	2,004	0.005 < 0.05	H ₄ diterima

Sumber: Data Olahan Primer, 2020

4.5.5.4. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Menurut Algifari (2013:260), nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan besarnya variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel dependen yang digunakan sebagai ukuran besarnya pengaruh (dalam persen) semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan bantuan aplikasi SPSS 21.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel.23
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.718	.698	3.67715

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Regulasi Anggota DPRD, Latar Belakang Individu, Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Poiltik

b. Dependen variabel : Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.21 hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,847 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD sebesar 84,7%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tinggi antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dari tabel 4.16 diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,698. Artinya adalah bahwa pengaruh partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 69,8%. Sedangkan sisanya 30,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian

ini. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang cukup tinggi antara variabel independen dengan variabel dependen.

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik, pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten kuantan singing. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.6.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh partisipasi masyarakat dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel partisipasi masyarakat adalah 0,013 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,561 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktifitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Simson, dkk, 2007).

Pengaruh antara partisipasi masyarakat dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Karena tujuan dari pengawasan keuangan daerah itu adalah agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan, misalnya pada pelaksanaan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrebang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek, itulah salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Achmadi (2002) dalam Isma (2012) bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui legislatif. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Aditya (2012) dan Isma (2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Simson, dkk (2007).

4.6.2. Pengaruh Latar Belakang Individu terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang individu dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh latar belakang individu dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel latar belakang individu adalah 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.388 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengaruh latar belakang individu dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah apabila latar belakang yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sesuai dengan pekerjaan yang digeluti sekarang, maka perannya dalam pengawasan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Winarna dan Murni (2007) bahwa latar belakang individu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak roda organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Setiap anggota dewan yang terpilih mempunyai latar belakang individu yang berbeda-beda sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Dengan mengetahui lebih

dalam latar belakang individu anggota dewan akan membantu menilai kinerja para anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan peneliti Nisa dan Ririn Irmadariyani (2016). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Sri Murni (2007), Kartikasari (2012).

4.6.3. Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang politik dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh latar belakang politik dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel latar belakang politik adalah 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.003 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Latar belakang politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif dalam pengawasan keuangan daerah yaitu termasuk didalamnya latar belakang politik dari anggota dewan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Kartikasari (2012) bahwa

karakteristik utama dari latar belakang politik adalah terkait dengan nilai yang merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Latar belakang politik yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi anggota dewan, jabatan di partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarahan tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab legislatif dengan baik dan benar, serta sejauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh anggota DPRD (Kartikasari,2012)

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, disinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. DPRD akan dapat menjalankan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal dalam arti memahami dengan benar hak, tugas dan wewenang dan mampu mengaplikasikannya dengan baik, didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang baik. (Rosita,2014)

Oleh karena itu, dengan adanya latar belakang politik yang baik yang dimiliki oleh anggota dewan, maka dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerahnya juga akan semakin baik.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Kartikasari (2012) dan Rosita (2014) yang menyimpulkan bahwa latar belakang politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuarti (2014)

menyimpulkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.6.4. Pengaruh Pemahaman Regulasi Anggota DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman regulasi anggota DPRD dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, nilai sig. variabel pemahaman regulasi anggota DPRD adalah 0,005 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.897 > 2,004$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Oleh karena itu, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengaruh antara pemahaman regulasi anggota DPRD dengan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah dengan adanya pemahaman regulasi dari anggota DPRD, peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Karena sangat penting bagi anggota DPRD untuk memahami regulasi. Apabila anggota DPRD nya sendiri tidak memahami tentang peraturan, lalu bagaimana caranya anggota

DPRD tersebut dapat menjalankan perannya sebagai pengawas keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kartikasari (2012) bahwa pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Kartikasari (2012) yang menyimpulkan bahwa pemahaman regulasi anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh partisipasi masyarakat, latar belakang individu, latar belakang politik dan pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} partisipasi masyarakat adalah 2.561 dengan nilai signifikan 0,013. Dikarenakan nilai signifikan $0,013 < 0,05$, maka terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah akan semakin baik, sebaliknya kurangnya partisipasi dari masyarakat mengakibatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan juga akan buruk.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} latar belakang individu adalah 3.388 dengan nilai signifikan 0,001. Dikarenakan nilai signifikan $0,001 < 0,05$, maka terdapat pengaruh latar belakang individu terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila latar belakang yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sesuai dengan pekerjaan yang ia geluti sekarang, maka perannya dalam pengawasan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik sebaliknya apabila latar

belakang individu yang dimiliki oleh anggota DPRD tidak baik, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah juga akan semakin buruk.

3. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} latar belakang politik adalah 3.003 dengan nilai signifikan 0,004. Dikarenakan nilai signifikan $0,004 < 0,05$, maka terdapat pengaruh latar belakang politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik latar belakang politik dari anggota DPRD, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah juga akan semakin baik.
4. Dari hasil pengujian hipotesis keempat terbukti diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujiannya bahwa t_{hitung} pemahaman regulasi anggota DPRD adalah 2.897 dengan nilai signifikan 0,005. Dikarenakan nilai signifikan $0,005 < 0,05$, maka terdapat pengaruh pemahaman regulasi anggota DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman regulasi yang dimiliki oleh anggota DPRD, maka peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah juga akan semakin baik.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi, disarankan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai

acuan dalam menganalisis pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agar proses pengawasan keuangan daerah berjalan dengan baik, sebaiknya perlu peningkatan transparansi kebijakan publik diharapkan mampu mengurangi kemungkinan dewan untuk berbuat tidak benar atau melakukan kecurangan sehingga dapat melakukan tugas dengan baik sesuai fungsi dan tanggungjawabnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah lebih besar seperti pengetahuan dewan tentang anggaran dan lain-lain. Sehingga semakin banyak variabel yang diteliti maka semakin banyak pengetahuan dan pengalaman kita mengenai variabel-variabel yang terkait dengan pengawasan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan sampel yang lebih besar agar hasil penelitian lebih maksimal.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan penggunaan media pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi agar data yang dihasilkan bisa lebih *real*.

5.3. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban

responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

2. Data penelitian hanya dilakukan pada pertanyaan yang sifatnya tertutup, sehingga peneliti tidak mendapat argumen secara langsung dan detail dari responden secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Efferin, Sujoko. Darmadji, Stevanus, Hadi. dan Tan, Yuliawati. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauziah. Ifat. 2018. *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan: Serambi Semesta Distribusi*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta
- IKAPI. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BEFP
- Siti Irene Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta. UNY
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Widjaja. 2017. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*
- Wiyoso, Yonatan & Wasistino, Sadu. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokusmedia. Bandung

Jurnal dan Hasil Penelitian :

- Aditya Dibyo Saputro. 2012. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alfines. 2013. *"Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman"*. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h. 1-14
- Amalia. Nurul Fitri. 2013. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo)"*. Jurnal. Universitas Negeri Semarang h. 104-117.
- Coryanata, Isma, 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. (Tesis Program Pascasarjana FE Universitas Bengkulu) SNA X Makassar, Juli 2007)
- Fitriani. Anisa. 2013. *"Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Se- Karesidenan Surakarta)"*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Indah Mustika Dewi, 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kartikasari, Dewi. 2012. "Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali)". *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Vol.1 No 1. h. 1-19.
- Mutia Nuarta, 2014. *"Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Anggota"*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nisa, Choyrun, 2016. *"Pengaruh Personal Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)"*. Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember. h. 1-9
- Nur Aini, 2017. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik Dan Pemahaman Regulasi Anggota Dprd Terhadap Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd)* (Studi Empiris Pada: Anggota DPRD Provinsi Riau. Skripsi. Skripsi. Universitas Riau.

- Roseptalia Rima, 2006. *"Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik"*. Skripsi, UII.
- Rosita, 2014. *"Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)"*. Universitas Pendidikan Ganesha. E-journal S1 Ak. Vol. 2 No.1. h. 1-12
- Simson Dkk, 2007. *"Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)"* Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ulan Sari. Dwiva. 2016. *Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Winarna. Jaka dan Murni. Sri. 2007. *"Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)"* Jurnal. Universitas Sebelas Maret. Vol. 9 No.2. h. 136-152

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Website :

news.detik.com. Diakses pada 03 Oktober 2019

riaumandiri.com. Diakses pada 03 Oktober 2019

news.detik.com. Diakses pada 03 Oktober 2019

halloriau.com. Diakses pada 03 Oktober 2019

www.bpk.go.id Diakses pada 18 Oktober 2019

www.kpk.go.id Diakses pada 12 Desember 2019

Lampiran 1 : Kuesioner



**Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu,
Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota
DPRD Terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan
Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

SURAT PERMOHONAN RESPONDEN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara selaku responden
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan survey dalam rangka penulisan skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi, maka saya melakukan penelitian dengan Judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”

Dengan Identitas Peneliti sebagai berikut :

Nama : Sherly Dwi Cipta
NPM : 160412072
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Akuntansi

Sehubungan dengan hal diatas, maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Saya menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu Bapak/Ibu/Saudara miliki. Namun, penelitian ini tidak dapat saya lakukan tanpa bantuan Bapak/Ibu/Saudara. Informasi yang saya peroleh akan saya jaga kerahasiaannya, karena hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian semata.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Sherly Dwi Cipta
160412072

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK, DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

**(Studi Empiris pada: Anggota DPRD Kab. Kuantan Singingi Masa
Jabatan 2019-2024)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kab. Kuantan Singingi Masa Jabatan 2019-2024. Demi tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk dapat mengisi daftar pernyataan dengan keadaan yang sebenarnya.

Informasi yang diperoleh tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain, kecuali dalam bentuk skripsi dan artikel.

Daftar pertanyaan ini berisi dua jenis pertanyaan yaitu jenis isian dan jenis pilihan. Pada jenis isian mohon diisi pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. Sedangkan pada jenis pilihan mohon diisi pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/i.

Mohon diisi data identitas di bawah ini:

IDENTITAS RESPONDEN (DEWAN)

Mohon diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada pernyataan pilihan. Serta jawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Jabatan di DPRD :
 Ketua DPRD
 Wakil Ketua
 Anggota Komisi Jabatan di Komisi.....
 Anggota Fraksi Jabatan di Fraksi.....
5. Berapa Periode Bapak/Ibu/Sdr. Menjadi anggota DPRD :
 Periode tahun s/d selama Tahun di DPRD.....
 Periode tahun s/d selama Tahun di DPRD.....
6. Strata Pendidikan : SLTA/Sederajat D1 D2 D3 D4
 S1 S2 S3 Lainnya.....
7. Pekerjaan utama terakhir sebelum menjadi anggota DPRD
8. Bapak/Ibu/Sdr. adalah anggota Partai Politik (Parpol)
9. Sebelum menjadi anggota Parpol yang sekarang Bapak/Ibu/Sdr. Pernah menjadi anggota Parpol lain, sebutkan
10. Pengalaman di Organisasi Sosial Kemasyarakatan

No	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan

Untuk kelompok I, jawablah dengan cara mencentang kolom yang telah disediakan, sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu/Saudara/i.

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1) S : Setuju (Skor 4)
 TS : Tidak Setuju (Skor 2) SS : Sangat Setuju (Skor 5)
 N : Netral (Skor 3)

Kelompok Pernyataan I : Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
2	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD					
3	Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD					
4	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran					
5	Saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD					
6	Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat selama ini menjadi hambatan partisipasi masyarakat dalam advokasi anggaran					
7	Pertemuan kelompok masyarakat, jajak pendapat dan kajian media massa serta diskusi publik efektif dalam penyusunan APBD					
8	Saran dan kritik dari masyarakat saya kira dapat dijadikan pertimbangan untuk merivisi anggaran					
9	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD biasanya dewan mensosialisasikan dalam masyarakat					
10	Menurut saya penjangkaran aspirasi masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD					

Untuk kelompok II, jawablah dengan cara mencentang kolom yang telah disediakan, sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu/Saudara/i.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1) S : Setuju (Skor 4)
 TS : Tidak Setuju (Skor 2) SS : Sangat Setuju (Skor 5)
 N : Netral (Skor 3)

Kelompok Pernyataan II : Latar Belakang Individu

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Jenjang pendidikan anggota dewan mendukung dalam pelaksanaan tugas.					
2	Latar belakang pendidikan anggota dewan dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
3	Pendidikan anggota dewan bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu					
4	Pengalaman organisasi anggota dewan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota dewan saat ini.					
5	Pengalaman organisasi anggota dewan mempengaruhi keahlian dalam melaksanakan tugas.					
6	Semakin lama anggota dewan mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan.					
7	Pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas.					
8	Masa kerja anggota dewan di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas.					
9	Anggota dewan telah mengikuti berbagai pelatihan tentang keuangan daerah.					
10	Sertifikasi dari pelatihan keuangan					

	daerah yang diperoleh anggota dewan dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas.					
--	--	--	--	--	--	--

Untuk kelompok III-IV, jawablah dengan cara mencentang kolom yang telah disediakan, sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu/Saudara/i.

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1) S : Setuju (Skor 4)
 TS : Tidak Setuju (Skor 2) SS : Sangat Setuju (Skor 5)
 N : Netral (Skor 3)

Kelompok Pernyataan III: Latar Belakang Politik

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sebelum Anggota dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan telah memiliki pengalaman yang cukup dipartai politik.					
2	Sebelum Anggota dewan menjadi anggota dewan, anggota dewan aktif dalam keikutsertaan sebagai pengurus dipartai politik.					
3	Anggota dewan mendapat pembekalan dan informasi yang lengkap tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif sebelum dan selama menjadi anggota dewan.					
4	Dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik, anggota dewan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari partai politik anggota dewan.					
5	Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD dengan baik, anggota dewan harus sudah pernah memegang jabatan dalam partai politik					
6	Jabatan anggota dewan dalam partai politik melatih tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.					

7	Pengalaman menjabat di partai politik menjadikan anggota dewan lebih bijaksana.					
8	Pengalaman anggota dewan di partai politik memberikan peluang bagi anggota dewan untuk melakukan suatu kecurangan.					
9	Anggota dewan dalam mempertimbangkan usulan/kebutuhan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan partai atau kepentingan partai lainnya.					

Kelompok Pernyataan IV : Pemahaman Anggota DPRD Riau terhadap Regulasi (UU dan Peraturan)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Anggota dewan memahami Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.					
2	Anggota dewan memahami Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.					
3	Anggota dewan memahami Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.					
4	Anggota dewan memahami Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.					
5	Anggota dewan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.					

6	Anggota dewan memahami Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.					
7	Anggota dewan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara					
8	Anggota dewan memahami Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.					
9	Anggota dewan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.					

Untuk kelompok V, jawablah dengan cara mencentang kolom yang telah disediakan, sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu/Saudara/i.

TP : Tidak Pernah (Skor 1) SR : Sering (Skor 4)
 J : Jarang (Skor 2) SL : Selalu (Skor 5)
 N : Netral (Skor 3)

Kelompok Pernyataan V : Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	TP	J	N	SR	SL
1	Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
2	Analisis politik selalu dilakukan dalam penyusunan APBD					
3	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD					
4	Anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah					
5	Anggota dewan aktif memantau proses perencanaan keuangan daerah (APBD)					
6	Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban					

Lampiran 2 : Tabulasi Data

No	PERAN ANGGOTA DPRD DLM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Y)										JUMLAH
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	45
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	45
5	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	17
6	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	44
7	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	45
8	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	34
9	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	43
10	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	44
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
12	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
13	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	31
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	33
16	5	4	4	4	5	3	3	3	3	3	37
17	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
18	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	46
19	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
20	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
21	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	33
22	3	4	5	3	3	3	3	4	3	3	34

Lanjutan Tabel

23	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	25
24	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
25	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	39
26	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
27	4	4	4	3	3	3	3	5	3	4	36
28	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32
29	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	34
30	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
31	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
32	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	44
33	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	16
34	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	46
35	3	3	4	4	4	4	4	5	5	4	40
36	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	37
37	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
38	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
39	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
40	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
41	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	44
42	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	46
43	3	4	5	4	5	5	4	4	5	4	43
44	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42
45	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38
46	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	45
47	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	43

Lanjutan Tabel

48	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	40
49	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
50	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
51	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	46
52	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	43
53	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	35
56	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	43
57	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32
58	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
59	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	43
60	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	34

No	PARTISIPASI MASYARAKAT (X1)										JUMLAH
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	46
2	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	34
3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	43
4	4	4	4	4	3	3	3	5	3	5	38
5	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	16
6	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
7	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	34
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	44
10	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	34
11	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29
12	4	4	4	3	4	4	3	5	3	4	38
13	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	16
14	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42
15	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28
16	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	37
17	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	41
18	4	3	4	3	4	4	4	5	3	4	38
19	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	15
20	3	3	4	3	4	4	4	5	4	5	39
21	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
22	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	33
23	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	16

Lanjutan Tabel

24	4	4	4	4	3	3	4	5	5	4	40
25	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	35
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	35
28	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	28
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
30	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	41
31	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	33
32	4	5	4	4	4	5	3	5	4	5	43
33	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	16
34	5	5	4	5	4	5	4	4	3	4	43
35	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	38
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
37	3	3	4	4	3	4	4	4	4	5	38
38	5	5	4	4	4	5	5	4	3	4	43
39	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	37
40	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	16
41	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	41
42	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	45
43	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	37
44	4	4	5	4	4	5	4	4	3	5	42
45	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	32
46	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	35
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
48	4	4	3	3	4	4	4	5	3	4	38

Lanjutan Tabel

49	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	33
50	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	36
51	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	42
52	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	15
53	4	5	4	4	4	3	4	4	5	5	42
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	16
56	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
58	4	4	4	4	3	4	4	5	3	5	40
59	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	39
60	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29

No	LATAR BELAKANG INDIVIDU (X2)										JUMLAH
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
2	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	36
3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	37
5	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	16
6	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	45
7	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
8	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	46
9	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	16
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	31
11	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36
12	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	39
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
14	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	32
15	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	16
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	35
19	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	16
20	3	4	3	4	3	5	5	5	3	3	38
21	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
22	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	27
23	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	25

Lanjutan Tabel

24	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	35
25	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
26	5	5	4	4	3	4	4	4	4	3	40
27	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31
28	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
29	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	33
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	38
32	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	33
33	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	15
34	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
36	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	26
37	4	4	3	3	4	4	5	4	3	3	37
38	4	4	4	4	3	5	5	4	3	3	39
39	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	43
40	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
41	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	43
42	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	38
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	31
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	31
46	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
47	4	4	3	4	3	5	4	4	3	3	37
48	5	4	4	3	4	3	5	4	4	4	40

Lanjutan Tabel

49	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	16
50	4	4	3	5	4	5	4	5	3	3	40
51	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43
52	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
53	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
54	4	3	3	4	4	4	5	4	3	3	37
55	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	15
56	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
57	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	28
58	4	4	3	4	3	5	4	5	4	4	40
59	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	33
60	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	27

No	LATAR BELAKANG POLITIK (X3)									JUMLAH
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	
1	4	3	5	4	4	4	4	4	3	35
2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	40
5	2	2	1	1	2	1	2	2	2	15
6	4	3	4	4	5	4	4	4	4	36
7	1	1	2	2	2	2	2	2	2	16
8	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
9	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
10	5	4	3	3	3	3	3	4	4	32
11	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
13	2	2	2	2	2	1	2	1	1	15
14	4	4	4	4	5	5	5	5	4	40
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
16	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38
17	5	4	5	5	5	4	5	5	5	43
18	4	4	4	3	3	3	4	4	3	32
19	2	1	2	1	1	2	2	2	2	15
20	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
21	4	3	4	3	4	3	3	3	3	30
22	3	3	3	3	4	3	4	4	4	31
23	2	1	2	2	2	1	2	2	2	16

No	PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD (X4)									JUMLAH
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	
1	5	5	4	4	3	3	4	3	3	34
2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	38
4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	40
5	2	2	2	1	2	1	2	2	2	16
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	2	2	2	2	2	2	1	1	1	15
8	4	4	4	3	3	4	3	3	3	31
9	4	4	4	3	4	4	3	4	4	34
10	4	4	4	4	3	3	4	3	3	32
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
13	2	2	2	2	2	1	2	1	1	15
14	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
15	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
16	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
17	5	5	5	4	5	5	5	4	5	43
18	4	4	4	3	4	3	3	4	3	32
19	2	2	2	2	1	1	1	2	2	15
20	5	4	3	4	5	5	4	4	4	38
21	4	4	3	3	3	4	3	3	3	30
22	4	3	3	4	3	3	4	4	3	31
23	2	2	2	2	2	2	1	2	1	16

Lanjutan Tabel

49	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
50	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
51	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
52	5	5	5	4	5	4	4	5	4	41
53	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
54	5	5	5	4	5	5	4	5	4	42
55	4	4	3	4	4	3	3	3	3	31
56	4	4	4	4	5	5	5	4	4	39
57	2	2	2	2	1	2	2	1	1	15
58	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
59	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
60	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30

Lampiran 3 : Hasil Pengolahan Data

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Y)

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD1	60	2	5	3,92	0,809
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD2	60	2	5	4,03	0,736
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD3	60	2	5	4,15	0,777
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD4	60	1	5	3,73	0,800
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD5	60	2	5	3,95	0,790
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD6	60	2	5	3,88	0,804
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD7	60	1	5	3,83	0,806
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD8	60	1	5	3,97	0,920
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD9	60	2	5	3,95	0,832
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADDPKD10	60	1	5	3,83	0,806
Valid N (Listwise)	60				

**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF
PARTISIPASI MASYARAKAT (X1)**

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM1	60	1	5	3,53	0,892
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM2	60	2	5	3,52	0,892
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM3	60	1	5	3,40	0,785
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM4	60	1	5	3,38	0,904
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM5	60	1	5	3,28	0,922
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM6	60	1	5	3,47	1,112
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM7	60	1	5	3,42	0,944
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM8	60	1	5	3,55	1,227
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM9	60	1	5	3,22	1,043
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM10	60	1	5	3,62	1,091
Valid N (Listwise)	60				

**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF
LATAR BELAKANG INDIVIDU (X2)**

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI1	60	1	5	3,45	0,928
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI2	60	1	5	3,40	0,906
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI3	60	1	5	3,25	0,876
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI4	60	1	5	3,42	0,944
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI5	60	1	5	3,33	0,933
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI6	60	1	5	3,45	0,999
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI7	60	1	5	3,52	0,965
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI8	60	1	5	3,37	1,008
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI9	60	1	5	3,25	0,950
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBI10	60	1	5	3,23	0,831
Valid N (Listwise)	60				

**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF
LATAR BELAKANG POLITIK (X3)**

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP1	60	1	5	3,77	1,079
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP2	60	1	5	3,40	1,092
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP3	60	1	5	3,77	1,110
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP4	60	1	5	3,58	1,078
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP5	60	1	5	3,73	1,087
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP6	60	1	5	3,47	1,033
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP7	60	1	5	3,73	1,006
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP8	60	1	5	3,63	1,057
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LBP9	60	1	5	3,57	0,981
Valid N (Listwise)	60				

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD (X4)

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD1	60	2	5	3,95	1,032
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD2	60	2	5	3,83	0,994
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD3	60	2	5	3,77	0,998
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD4	60	1	5	3,63	0,991
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD5	60	1	5	3,63	1,089
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD6	60	1	5	3,52	1,112
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD7	60	1	5	3,48	1,112
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD8	60	1	5	3,48	1,033
Valid N (Listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRAD9	60	1	5	3,33	1,084
Valid N (Listwise)	60				

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Masyarakat (X1)	60	15	46	34.38	8.657
Latar Belakang Individu (X2)	60	15	46	33.67	8.140
Latar Belakang Politik (X3)	60	15	45	32.65	8.714
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD (X4)	60	15	45	32.62	8.722
Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	60	16	48	39.25	6.688
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Olahan, 2020

HASIL UJI RELIABILITAS
PERAN ANGGOTA DPDR DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.948	10

HASIL UJI RELIABILITAS
PARTISIPASI MASYARAKAT (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.966	10

HASIL UJI RELIABILITAS
LATAR BELAKANG INDIVIDU (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.964	10

HASIL UJI RELIABILITAS
LATAR BELAKANG POLITIK (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.975	9

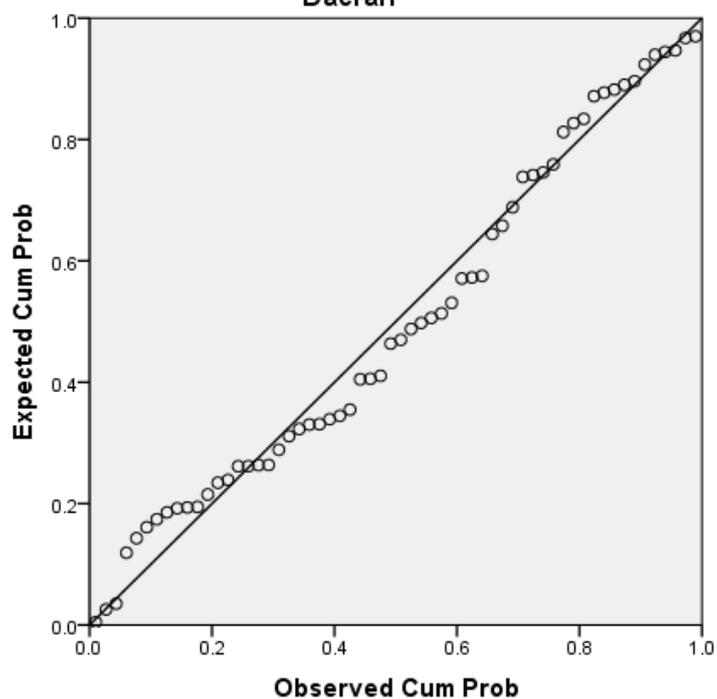
HASIL UJI RELIABILITAS
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD (X4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.978	9

HASIL UJI NORMALITAS DATA

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah



HASIL MULTIKOLONIERITAS

Coefficients^a

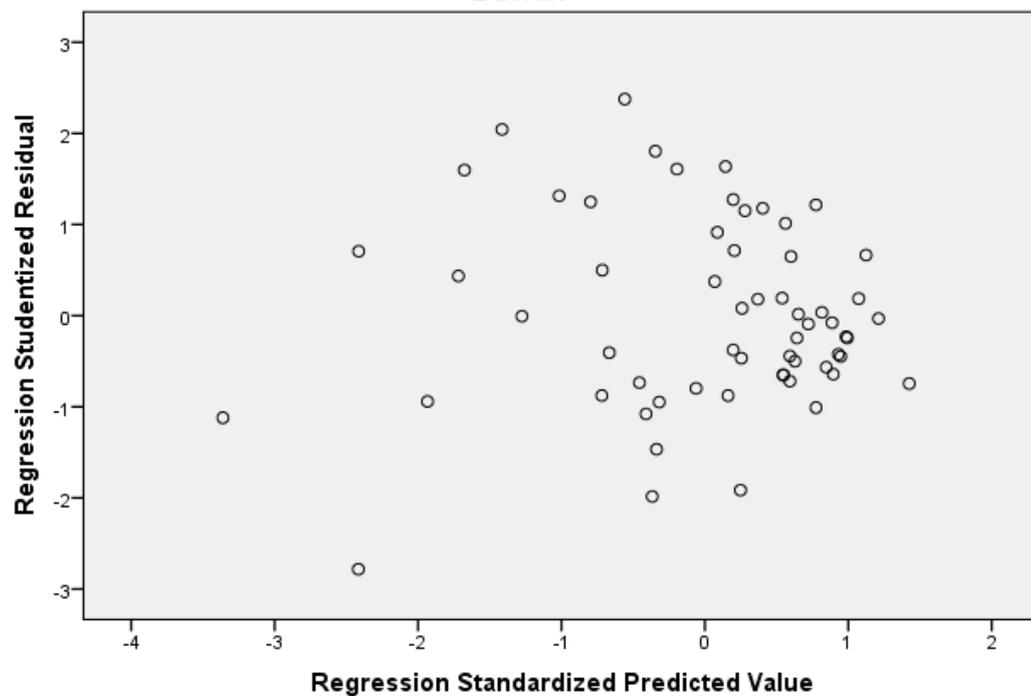
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Partisipasi Masyarakat	.371	2.698
	Latar Belakang Individu	.651	1.536
	Latar Belakang Politik	.261	3.530
	Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	.241	2.200

b. Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah



HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 ^a	.718	.698	3.67715	1.961

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Regulasi Anggota DPRD, Latar Belakang Individu, Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Politik

b. Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	4.199	2.293
Partisipasi Masyarakat	.233	.091
Latar Belakang Individu	.247	.073
Latar Belakang Politik	.865	.095
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	.603	.093

a. Dependent Variable : Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

HASIL UJI HIPOTESIS PENELITIAN

1. HASIL UJI SIMULTAN (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1895.570	4	473.893	35.047	.000 ^b
Residual	743.680	55	13.521		
Total	2639.250	59			

a. Dependent Variable: Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Regulasi Anggota DPRD, Latar Belakang Individu, Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Politik

2. HASIL UJI PARSIAL (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		6.192	.000
Partisipasi Masyarakat	.301	2.561	.013
Latar Belakang Individu	.302	3.388	.001
Latar Belakang Politik	.461	3.003	.004
Pemahaman Regulasi Anggota DPRD	.307	2.897	.005

a. Dependent Variable : Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	.718	.698	3.67715

- c. Predictors: (Constant), Pemahaman Regulasi Anggota DPRD, Latar Belakang Individu, Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Poilitik
- d. Dependen variabel : Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

UJI VALIDITAS DATA
PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Y)

Correlations

		PDDPKD 1	PDDPKD 2	PDDPKD 3	PDDPKD 4	PDDPKD 5	PDDPKD 6	PDDPKD 7	PDDPKD 8	PDDPKD 9	PDDPKD 10	TOTAL
PDD PKD1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 60	.688** ,000 60	.533** ,000 60	.699** ,000 60	.577** ,000 60	.636** ,000 60	.654** ,000 60	.497** ,000 60	.497** ,000 60	.524** ,000 60	.759** ,000 60
PDD PKD2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.688** ,000 60	1 60	.702** ,000 60	.678** ,000 60	.557** ,000 60	.637** ,000 60	.610** ,000 60	.578** ,000 60	.501** ,000 60	.581** ,000 60	.784** ,000 60
PDD PKD3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.533** ,000 60	.702** ,000 60	1 60	.665** ,000 60	.619** ,000 60	.625** ,000 60	.609** ,000 60	.647** ,000 60	.562** ,000 60	.582** ,000 60	.788** ,000 60
PDD PKD4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.699** ,000 60	.678** ,000 60	.665** ,000 60	1 60	.703** ,000 60	.741** ,000 60	.798** ,000 60	.771** ,000 60	.616** ,000 60	.745** ,000 60	.897** ,000 60
PDD PKD5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.577** ,000 60	.557** ,000 60	.619** ,000 60	.703** ,000 60	1 60	.684** ,000 60	.652** ,000 60	.534** ,000 60	.537** ,000 60	.625** ,000 60	.782** ,000 60
PDD PKD6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.636** ,000 60	.637** ,000 60	.625** ,000 60	.741** ,000 60	.684** ,000 60	1 60	.910** ,000 60	.659** ,000 60	.700** ,000 60	.728** ,000 60	.884** ,000 60
PDD PKD7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.654** ,000 60	.610** ,000 60	.609** ,000 60	.798** ,000 60	.652** ,000 60	.910** ,000 60	1 60	.724** ,000 60	.695** ,000 60	.765** ,000 60	.898** ,000 60

Lanjutan Tabel

PDD PKD8	Pearson Correlation	.497**	.578**	.647**	.771**	.534**	.659**	.724**	1	.662**	.815**	.839**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PDD PKD9	Pearson Correlation	.497**	.501**	.562**	.616**	.537**	.700**	.695**	.662**	1	.695**	.785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PDD PKD1 0	Pearson Correlation	.524**	.581**	.582**	.745**	.625**	.728**	.765**	.815**	.695**	1	.857**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOT- AL	Pearson Correlation	.759**	.784**	.788**	.897**	.782**	.884**	.898**	.839**	.785**	.857**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA
PARTISIPASI MASYARAKAT (X1)

Correlations

		PPM1	PPM2	PPM3	PPM4	PPM5	PPM6	PPM7	PPM8	PPM9	PPM10	TOTAL
PPM1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 60	.862** 60	.755** 60	.751** 60	.802** 60	.770** 60	.718** 60	.734** 60	.657** 60	.649** 60	.866** 60
PPM2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.862** 60	1 60	.692** 60	.759** 60	.766** 60	.744** 60	.645** 60	.711** 60	.697** 60	.712** 60	.856** 60
PPM3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.755** 60	.692** 60	1 60	.807** 60	.824** 60	.811** 60	.777** 60	.823** 60	.699** 60	.835** 60	.907** 60
PPM4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.751** 60	.759** 60	.807** 60	1 60	.762** 60	.797** 60	.803** 60	.708** 60	.738** 60	.753** 60	.889** 60
PPM5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.802** 60	.766** 60	.824** 60	.762** 60	1 60	.811** 60	.797** 60	.759** 60	.710** 60	.750** 60	.901** 60
PPM6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.770** 60	.744** 60	.811** 60	.797** 60	.811** 60	1 60	.813** 60	.802** 60	.671** 60	.737** 60	.904** 60
PPM7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.718** 60	.645** 60	.777** 60	.803** 60	.797** 60	.813** 60	1 60	.735** 60	.733** 60	.701** 60	.874** 60

Lanjutan Tabel

PPM8	Pearson Correlation	.734**	.711**	.823**	.708**	.759**	.802**	.735**	1	.766**	.831**	.900**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PPM9	Pearson Correlation	.657**	.697**	.699**	.738**	.710**	.671**	.733**	.766**	1	.745**	.845**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PPM10	Pearson Correlation	.649**	.712**	.835**	.753**	.750**	.737**	.701**	.831**	.745**	1	.879**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	.866**	.856**	.907**	.889**	.901**	.904**	.874**	.900**	.845**	.879**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA
LATAR BELAKANG INDIVIDU (X2)

Correlations

		PLBI1	PLBI2	PLBI3	PLBI4	PLBI5	PLBI6	PLBI7	PLBI8	PLBI9	PLBI10	TOTAL
PLBI1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 60	.851** ,000 60	.797** ,000 60	.711** ,000 60	.705** ,000 60	.619** ,000 60	.720** ,000 60	.708** ,000 60	.677** ,000 60	.697** ,000 60	.857** ,000 60
PLBI2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.851** ,000 60	1 60	.769** ,000 60	.733** ,000 60	.722** ,000 60	.697** ,000 60	.768** ,000 60	.784** ,000 60	.709** ,000 60	.730** ,000 60	.890** ,000 60
PLBI3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.797** ,000 60	.769** ,000 60	1 60	.712** ,000 60	.768** ,000 60	.664** ,000 60	.707** ,000 60	.682** ,000 60	.738** ,000 60	.710** ,000 60	.863** ,000 60
PLBI4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.711** ,000 60	.733** ,000 60	.712** ,000 60	1 60	.725** ,000 60	.768** ,000 60	.727** ,000 60	.781** ,000 60	.713** ,000 60	.717** ,000 60	.872** ,000 60
PLBI5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.705** ,000 60	.722** ,000 60	.768** ,000 60	.725** ,000 60	1 60	.691** ,000 60	.765** ,000 60	.751** ,000 60	.822** ,000 60	.795** ,000 60	.888** ,000 60
PLBI6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.619** ,000 60	.697** ,000 60	.664** ,000 60	.768** ,000 60	.691** ,000 60	1 60	.774** ,000 60	.860** ,000 60	.630** ,000 60	.586** ,000 60	.842** ,000 60
PLBI7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.720** ,000 60	.768** ,000 60	.707** ,000 60	.727** ,000 60	.765** ,000 60	.774** ,000 60	1 60	.812** ,000 60	.707** ,000 60	.671** ,000 60	.881** ,000 60

Lanjutan Tabel

PLBI8	Pearson Correlation	.708**	.784**	.682**	.781**	.751**	.860**	.812**	1	.717**	.685**	.897**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PLBI9	Pearson Correlation	.677**	.709**	.738**	.713**	.822**	.630**	.707**	.717**	1	.891**	.870**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PLBI10	Pearson Correlation	.697**	.730**	.710**	.717**	.795**	.586**	.671**	.685**	.891**	1	.854**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	.857**	.890**	.863**	.872**	.888**	.842**	.881**	.897**	.870**	.854**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA
LATAR BELAKANG POLITIK (X3)

Correlations

		PLBP1	PLBP2	PLBP3	PLBP4	PLBP5	PLBP6	PLBP7	PLBP8	PLBP9	TOTAL
PLBP1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 60	.900** 60	.760** 60	.760** 60	.769** 60	.768** 60	.769** 60	.770** 60	.784** 60	.885** 60
PLBP2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.900** 60	1 60	.805** 60	.820** 60	.819** 60	.808** 60	.839** 60	.790** 60	.782** 60	.920** 60
PLBP3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.760** 60	.805** 60	1 60	.923** 60	.832** 60	.821** 60	.808** 60	.821** 60	.777** 60	.918** 60
PLBP4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.760** 60	.820** 60	.923** 60	1 60	.858** 60	.817** 60	.818** 60	.815** 60	.772** 60	.922** 60
PLBP5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.769** 60	.819** 60	.832** 60	.858** 60	1 60	.822** 60	.833** 60	.798** 60	.812** 60	.917** 60
PLBP6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.768** 60	.808** 60	.821** 60	.817** 60	.822** 60	1 60	.872** 60	.858** 60	.839** 60	.922** 60
PLBP7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.769** 60	.839** 60	.808** 60	.818** 60	.833** 60	.872** 60	1 60	.879** 60	.809** 60	.925** 60

Lanjutan Tabel

PLBP8	Pearson Correlation	.770**	.790**	.821**	.815**	.798**	.858**	.879**	1	.874**	.922**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PLBP9	Pearson Correlation	.784**	.782**	.777**	.772**	.812**	.839**	.809**	.874**	1	.902**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	.885**	.920**	.918**	.922**	.917**	.922**	.925**	.922**	.902**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA
PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD (X4)

Correlations

		PPRAD1	PPRAD2	PPRAD3	PPRAD4	PPRAD5	PPRAD6	PPRAD7	PPRAD8	PPRAD9	TOTAL
PPRAD1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 60	.933** 60	.844** 60	.827** 60	.843** 60	.835** 60	.848** 60	.802** 60	.848** 60	.936** 60
PPRAD2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.933** 60	1 60	.866** 60	.831** 60	.835** 60	.845** 60	.825** 60	.789** 60	.839** 60	.933** 60
PPRAD3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.844** 60	.866** 60	1 60	.838** 60	.809** 60	.813** 60	.806** 60	.802** 60	.841** 60	.915** 60
PPRAD4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.827** 60	.831** 60	.838** 60	1 60	.769** 60	.821** 60	.871** 60	.772** 60	.810** 60	.906** 60
PPRAD5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.843** 60	.835** 60	.809** 60	.769** 60	1 60	.887** 60	.821** 60	.838** 60	.881** 60	.926** 60
PPRAD6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.835** 60	.845** 60	.813** 60	.821** 60	.887** 60	1 60	.822** 60	.811** 60	.895** 60	.932** 60
PPRAD7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.848** 60	.825** 60	.806** 60	.871** 60	.821** 60	.822** 60	1 60	.767** 60	.890** 60	.922** 60

Lanjutan Tabel

PPRAD8	Pearson Correlation	.802**	.789**	.802**	.772**	.838**	.811**	.767**	1	.837**	.893**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PPRAD9	Pearson Correlation	.848**	.839**	.841**	.810**	.881**	.895**	.890**	.837**	1	.945**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	.936**	.933**	.915**	.906**	.926**	.932**	.922**	.893**	.945**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel r untuk df = 1-34

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254

Tabel r untuk df = 35-75

35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678

Tabel r untuk df = 76-100

76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Titik Presentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Presentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2,54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi t (df = 1-40)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 561604 561605 Fax (0760) 561605
 TELUK KUANTAN Kode Pos 29562

Teluk Kuantan, 2020

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Izin Penelitian

Kepada, Yth :
 Sdr. SHERLY DWI CIPTA
 di-
 Teluk Kuantan

Dengan Hormat,

Memenuhi surat Saudari Perihal : Izin Penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi memberi izin Penelitian kepada Saudari SHERLY DWI CIPTA dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dengan Judul Skripsi "PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

a.n SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 KEPALA BAGIAN UMUM

Sudarmo

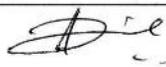
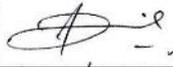
SUDARMO, S.Pd

NIP. 19641011 198512 1 002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SHERLY DWI CIPTA
 NPM : 160412072
 PEMBIMBING I : ZUL AMMAR, SE., ME
 PEMBIMBING II : RINA ANDRIANI, SE., M.Si
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) (Studi Empiris Pada : Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Masa Jabatan 2014 - 2019)

NO	TANGGAL/ BULAN/ TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	18/ 10 -2019	- Perbaiki Judul - Latar Belakang Masalah		
2.	07/ 11 -2019	- Spasi 2 - Referensi Pakai Halaman		
3.	07/ 11 -2019	- Daftar Pustaka - Referensi cari yg valid		
4.	27/ 11 -2019	- Lanjut Pembimbing II		
5.	04/ 12 -2019	- Cek kembali penulisan yang salah ketik, tidak sesuai buku panduan. - Perbaiki cara pengutipan - Perbaiki tabel - Perbaiki persamaan regresi.		Rn
		- Bawa kuesioner - finalkan skala yg digunakan		
6.	26/ 12 -2019	- ACC sempro - kembali ke pembimbing I		Rn

Mengetahui,

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Islam Kuantan Singingi


 Yul Emir Tulis, SE., M.Si
 NIDN. 1014038901

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SHERLY DWI CIPTA
 NPM : 160412072
 PEMBIMBING I : ZUL AMMAR, SE., ME
 PEMBIMBING II : RINA ANDRIANI, SE., M.Si
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, LATAR BELAKANG INDIVIDU, LATAR BELAKANG POLITIK DAN PEMAHAMAN REGULASI ANGGOTA DPRD TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH.

NO	TANGGAL/ BULAN/ TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	17/6-2020	- Konsistensikan spasi - Saran - Lampirkan		
				
	22/6-20	- Lanjut Pemb II		
	24/6-20	- Cek kembali penulisan - ACC komprehensif - kembali ke pembimbing I		Ru

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


Yuli Emir Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

BIODATA**Identitas Diri**

Nama : SHERLY DWI CIPTA
 Tempat / Tanggal Lahir : Teluk Kuantan / 07 September 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Perumnas, RT 005 RW 003 Kelurahan Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
 Telepon Rumah dan HP : +62 852 6363 7013
 E-mail : sherlydwicipta1@gmail.com
sherlydwicipta2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : -TK. Pertiwi Teluk Kuantan (2003-2004)
 - SD N 007 Teluk Kuantan (2004-2010)
 - SMP N & Teluk Kuantan (2010-2013)
 - SMK N 2 Teluk Kuantan (2013-2016)
 - S1 Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (2016-2020)
 Pendidikan Nonformal : -
 Riwayat Prestasi :
 Prestasi Akademik : - SD N 007 Teluk Kuantan meraih peringkat 2 pada kelas I dan 10 besar pada kelas II sampai dengan kelas VI.
 - SMP N & Teluk Kuantan meraih peringkat 10 besar pada kelas VII sampai dengan IX.
 - SMK N 2 Teluk Kuantan meraih :

- Juara 2 pada semester I
- Juara 2 pada semester II
- Juara 1 pada semester III

- Juara 1 pada semester IV
- Juara 1 pada semester V
- Juara Umum 2 kelas 1 semester II
- Juara Umum 2 kelas 2 semester III
- Juara Umum 2 kelas 3 semester V
- Juara 1 Coral Speaking
- Peserta LKS-SMK Tingkat Provinsi Tahun 2015 dan 2016.
- Piagam Penghargaan sebagai Siswa Berprestasi di Bidang Akademik tahun 2013 s/d 2016.
- Nilai rata-rata UNBK tertinggi pada tahun 2016 di SMK N 2 Teluk Kuantan.

- Juara 3 Debat Bahasa Indonesia di UNIKS pada tahun 2016

Prestasi Nonakademik : -
 Pengalaman Organisasi : -
 Pengalaman Kerja : Relawan Pajak pada tahun 2019 di Kanwil DJP Riau.

Demikian identitas diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, 04 Juli 2020

SHERLY DWI CIPTA
 NPM : 160412072